



PEMERINTAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU

**KAPUAS HULU!**  
**HEBAT!**

# RENSTRA 2021 - 2026



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**JL. D.I. PANJAITAN NO. 20**  
**TELP/FAX. (0567) 21049**  
**PUTUSSIBAU 78711**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mah Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan. Renstra ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada serta mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Dokumen Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang realistis. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelaraskan strategi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja), perencanaan kinerja tahunan (RKT) dan pengukuran kinerja kegiatan instansi pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Dengan berpedoman kepada Renstra, akan disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di Era Otonomi Daerah ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Kapuas Hulu HEBAT.



Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

**Drs. H. ABDURRASYID, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196308071989101001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Landasan Hukum .....	2
Maksud dan Tujuan.....	5
Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN .....	8
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Lembaga Terkait.....	41
Penentuan Isu-Isu Strategis Menggunakan Analisis SWOT.....	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	56
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	75
BAB VIII PENUTUP .....	82



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja .....	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu .....	16
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu .....	19
Tabel 2.5	Hasil Anlisis Neraca Bahan Makanan (NBM) .....	20
Tabel 2.6	Jumlah Daerah Rentan Pangan Tahun 2020 Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security Vulnerability Atlas .....	21
Tabel 2.7	Data Harga Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu .....	22
Tabel 2.8	Data Perkembangan Luas Tanam Tanaman Pangan.....	23
Tabel 2.9	Data Perkembangan Produksi Tanaman Pangan.....	23
Tabel 2.10	Data Perkembangan Luas Tanam Komoditi Hortikultua .....	24
Tabel 2.11	Data Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura.....	25
Tabel 2.12	Luas Areal Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu .....	27
Tabel 2.13	Jumlah Produksi Perkebunan .....	27
Tabel 2.14	Rekapitulasi Data Pemasukan Ternak .....	28
Tabel 2.15	Rekapitulasi Data Populasi Ternak.....	28
Tabel 2.16	Rekapitulasi Data Produksi Ternak .....	29
Tabel 2.17	Rekapitulasi Data Kejadian Penyakit Hewan Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Dan Laporan Isikhnas Kabupaten Kapuas Hulu .....	30
Tabel 2.18	Perkembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Kelompok Tani (POKTAN) di Kabupaten Kapuas Hulu.....	31
Tabel 2.19	Perkembangan Anggota Kelompok Tani di Kabupaten Kapuas Hulu .....	32
Tabel 2.20	Data Perkembangan Keadaan UPTD-BPP Kelansin Kecamatan Mentebah Tahun 2021 .....	33
Tabel 2.21	Kondisi Penggunaan Lahan UPTD-BPP Klansin Kecamatan Mentebah Tahun 2021 .....	34
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD .....	37
Tabel 3.2	Program Utama RTRW Periode Jangka Menengah II dan III Kabupaten Kapuas Hulu.....	46
Tabel 3.3	Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman).....	52



Tabel 3.4	Strategis Faktor Analisis SWOT .....	54
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah....	59





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, antara lain berfungsi sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan menyesuaikan kondisi pada tahun berjalan.
2. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 – 2021.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra SKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan daerah disusun dengan [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan memperhatikan Renstra Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Pertanian.

Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 ditempuh dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.
4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif.
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);





15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025



- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
  32. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
  33. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 54.a tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan, dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk



melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanian selama 5 (lima) tahun ke depan.

b. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ini ditetapkan dengan maksud agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2026. Sedangkan tujuan Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penjabaran visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu secara nyata pada program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja.
- 3) Sinkronisasi program/kegiatan OPD agar terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- 4) Meningkatkan kinerja aparatur yang terukur, transparan, dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian dan Perkebunan, yang efektif dan efisien.
- 6) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya, selama kurun waktu 2021-2026.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



### Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra dan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Barat; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kapuas Hulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Bidang Pertanian, peternakan dan Perkebunan.

### Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

#### 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan bidang pangan sesuai dengan PERBUP Kapuas Hulu No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diserahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok jabatan fungsional ;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan;
- d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai kelengkapan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri beberapa bidang :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian dan pangan. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :





- a) Penetapan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
  - b) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan instansi lainnya;
  - c) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pertanian dan Pangan;
  - d) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang pertanian dan Pangan.
  - f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan secara periodik; dan
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan program kerja Dinas;
  - b) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
  - c) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, organisasi dan tata laksana Dinas;
  - e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
  - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
  - g) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan sekretariat; dan
  - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman Ketahanan Pangan, Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan;
  - b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana bidang Ketahanan Pangan;
  - c) Penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan;
  - d) Penanganan Konsumsi dan keamanan pangan;
  - e) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
  - f) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Ketahanan Pangan;



- g) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan secara periodik; dan
  - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c) Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d) Pelaksanaan kegiatan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e) Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - f) Pemberian izin/ rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - g) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - h) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik;
  - i) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik;
  - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepada Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 5) Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang bertugas membantu kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan rencana Operasional Bidang Perkebunan;
  - b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perkebunan;
  - c) Peningkatan produksi Perkebunan;
  - d) Pelaksanaan perlindungan di Bidang Perkebunan;
  - e) Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - f) Pemberian izin/ rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;
  - g) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Perkebunan;



- h) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Perkebunan secara periodik;
  - i) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan secara periodik;
  - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Bidang Peternakan, adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Peternakan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan rencana Operasional Bidang Peternakan;
  - b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peternakan;
  - c) Peningkatan produksi Peternakan;
  - d) Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan vateriner;
  - e) Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat vateriner;
  - f) Pemberian izin/ rekomendasi teknis di Bidang Peternakan;
  - g) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
  - h) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Peternakan secara periodik;
  - i) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan secara periodik;
  - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Bidang Penyuluhan, adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui sekretaris dalam merumuskan serta melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - c) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
  - d) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - e) Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan/ atau keahliannya yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keterampilan dan/ atau keahlian yang dimilikinya. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Dinas melalui pimpinan satuan organisasi yang berada dalam lingkup kerjanya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) adalah merupakan gambaran ruang lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan secara utuh dan menyeluruh. Secara lebih rinci gambaran Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada lampiran 1.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu 62 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Aparatur
- c. Bidang Ketahanan Pangan
  - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
  - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan
  - Seksi Produksi Perkebunan
  - Seksi Perlindungan Perkebunan



f. Bidang Peternakan

- Seksi Bina Produksi dan Usaha Peternakan.
- Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

g. Bidang Penyuluhan Pertanian

- Seksi Tata Penyuluhan Pertanian
- Seksi Kelembagaan Petani

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejak tahun 2007 Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian telah mengalami 3 (dua) kali perubahan yaitu : Peraturan Bupati Nomor : 08 tahun 2007, Nomor 33 tahun 2008 dan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Agar sistem organisasi dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan personil yang handal dan prima sesuai dengan disiplin ilmu dan proporsinya masing-masing, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai instansi teknis dapat bermanfaat bagi publik. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh 245 Orang terdiri dari 57 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, 83 Orang Jabatan Fungsional (PPL), 1 Orang Jafung khusus, 3 Orang Pegawai Pusat PHP/POPT, 71 Orang Pegawai Kontrak Daerah, 1 Orang THL –TB BPP dan 29 orang pegawai P3K.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

NO	Jenis Kepegawaian	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN										
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	Ket
1.	PNS DAERAH (Stuktural )	0	1	11	0	0	8	2	23	12	0	57
2.	JABATAN FUNGSIONAL	0	0	23	0	0	14	6	39	1	0	83
	A. Jabatan Fungsional (PPL)											
	B. JAFUNG KHUSUS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	PEGAWAI PUSAT PHP/POPT	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
4.	TENAGA KONTRAK	0	1	22	0	0	15	4	29	0	0	71
	1. Kontrak Daerah											
	2. THL –TB BPP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	3. P3K	0	0	18	0	0	2	1	8	0	0	29





JUMLAH	0	2	78	0	0	39	13	100	13	0	245
--------	---	---	----	---	---	----	----	-----	----	---	-----

Sumer: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja**

NO	Jenis Kepegawaian	MENURUT GOLONGAN RUANG																
		I				II				III				IV				Ket
		a	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	PNS DAERAH (Stuktural )	0	0	0	1	0	2	3	5	5	5	15	14	6	0	1	0	57
2.	JABATAN FUNGSIONAL	0	0	0	0	9	3	2	2	22	10	6	22	7	0	0	0	83
3.	PEGAWAI PUSAT PHP/POPT	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
JUMLAH		0	0	0	1	9	5	5	9	27	15	21	37	13	0	1	0	143

Sumer: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Peranan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sangat strategis dalam memberikan pelayanan prima dan profesional kepada publik. Hal ini adalah untuk mewujudkan masyarakat petani dan peternak yang berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), maju, tangguh, mandiri, berjiwa agribisnis, berbudaya industri, berdaya saing dan berbasis sumber daya lokal.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dapat diuraikan menjadi 2 (dua) urusan :

#### 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

##### a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 s/d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan

#### 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016 s/d 2019 adalah sebagai berikut :



- a) Peningkatan produksi pertanian
- b) Peningkatan pemasaran hasil pertanian
- c) Pemberdayaan penyuluhan
- d) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- e) Pengembangan sarana dan prasarana unit teknis pertanian

Program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 s/d tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- d) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- e) Program perizinan usaha pertanian
- f) Program penyuluhan pertanian

Tingkat capaian sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra 2016-2021 menurut indikator kinerja SKPD dengan struktur organisasi lama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	1.	Predikat SAKIP	C	CC	CC	B	B	C	CC	CC	B	B	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,07	76,34	77,78	79,14	80,60	71,80	75,40	77,90	71,60	69,56	95,64%	98,77%	100,15%	90,47%	86,30%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1.	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	5,28	5,78	6,01	6,6	6,6	5,28	5,78	6,01	6,6	6,6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2.	Jumlah Produksi Pertanian															
		2.1	Jumlah produksi tanaman pangan :															
		-	Padi (ton)	56.238,0	51.139,0	52.417,5	53.727,9	57.824,7	56.238,0	60.510,0	52.588,0	24.567,8	27.732,3	100,00%	118,32%	100,33%	45,73%	47,96%
		-	Jagung (ton)	204,0	239,0	245,0	251,1	270,3	204,0	244,0	255,0	1.258,0	1.023,6	100,00%	102,09%	104,09%	501,00%	378,76%
		-	Ubi Kayu(ton)	7.069,0	7.862,0	8.058,6	8.260,0	8.889,8	4.551,0	4,0	8.908,0	11.244,0	17.937,1	64,38%	0,05%	110,54%	136,13%	201,77%
			Hortikultura:															
		-	Cabe (ton)	177,4	311,5	320,9	330,5	357,4	194,1	362,1	387,8	228,9	224,9	109,41%	116,24%	120,87%	69,26%	62,93%
		-	Bawang Merah(ton)	-	3,9	4,0	4,1	4,1	-	3,9	-	-	3,6	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	86,96%



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Dinas Pertanian dan Pangan

KAPUAS HULU  
HEBAT!

		2.2	Jumlah produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan:															
		-	Padi (kw/ha)	25,21	25,84	26,49	27,15	24,00	24,33	25,93	22,35	26,08	28,51	96,51%	100,35%	84,37%	96,06%	118,79%
		-	Jagung (kw/ha)	11,97	12,27	12,58	12,89	21,21	9,14	7,40	26,35	27,95	20,76	76,36%	60,31%	209,46%	216,83%	97,88%
		-	Ubi Kayu (kw/ha)	190,72	195,49	200,38	205,38	210,52	190,03	201,30	200,62	209,78	257,72	99,64%	102,97%	100,12%	102,14%	122,42%
			Hortikultura :															
		-	Cabe (kw/ha)	17,56	28,31	29,16	30,03	35,03	12,40	24,14	18,70	12,37	12,28	70,62%	85,27%	64,13%	41,19%	35,06%
		-	Bawang Merah (kw/ha)	-	4,30	4,39	4,47	4,47	0,00	4,33	0,00	0,00	9,00	0,00%	100,70%	0,00%	0,00%	201,34%
		2.3	Jumlah produksi peternakan :															
		-	Sapi (kilo)	125.726	138.863	139.280	272.561	155.862	134.308	138.709	136.280	155.706	161.776	106,83%	99,89%	97,85%	57,13%	103,79%
		-	Kambing (kilo)	2.066	2.650	2.730	4.956	2.586	1.501	2.577	2.478	2.535	3.993	72,65%	97,25%	90,77%	51,15%	154,41%
		-	Babi (kilo)	140.774	121.997	122.363	250.675	168.924	119.574	121.867	119.369	168.755	132.064	84,94%	99,89%	97,55%	67,32%	78,18%
		-	Ayam Buras (kilo)	214.362	150.870	151.021	120.300	83.059	193.815	150.763	151.290	83.017	83.206	90,41%	99,93%	100,18%	69,01%	100,18%
		-	Ayam Ras Pedaging (kilo)	905.214	980.690	981.376	1.007.605	1.451.478	874.924	980.336	987.848	1.450.028	1.222.092	96,65%	99,96%	100,66%	143,91%	84,20%
		-	Itik (kilo)	301	425	489	1.793	6.623	341	371	386	1.673	978	113,29%	87,29%	78,94%	93,33%	53,62%
			Jumlah Populasi Ternak :															
		-	Sapi (ekor)	7.631	7.830	8.300	7.140	6.185	7.548	7.673	8.487	6.094	6.756	98,91%	97,99%	102,25%	85,35%	109,23%
		-	Kambing (ekor)	1.662	1.790	1.915	1.166	1.008	1.510	1.666	1.155	974	1.218	90,85%	93,07%	60,31%	83,53%	120,83%



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Dinas Pertanian dan Pangan

KAPUAS HULU  
HEBAT!

		-	Babi (ekor)	20.471	23.910	24.269	15.020	17.704	23.485	23.806	16.624	17.651	17.002	114,72%	99,57%	68,50%	117,52%	96,03%
		-	Ayam Buras (ekor)	164.350	165.990	166.488	154.133	138.323	164.499	165.694	149.644	137.772	118.320	100,09%	99,82%	89,88%	89,39%	85,54%
		-	Ayam Ras Pedaging (ekor)	598.707	648.910	652.155	659.857	1.154.307	571.891	647.853	653.324	1.150.854	1.025.805	95,52%	99,84%	100,18%	174,41%	88,87%
		-	Itik (ekor)	5.157	4.010	4.331	2.700	9.932	5.144	3.947	3.029	4.868	7.605	99,75%	98,43%	69,94%	180,30%	76,57%
			Jumlah Produksi perkebunan :															
		-	Kelapa Sawit (ton)	641.347	650.261	655.287	701.015	1.000.000	0,00	1.130.610	748.458,87	954.224,80	1.259.264,12	0,00%	173,87%	114,22%	136,12%	125,93%
		-	Karet (ton)	17.074	17.415	17.763	18.118	15.000	15.905	16.948	12.679	12.679	12.686	93,15%	97,32%	71,38%	69,98%	84,57%
		-	Kopi (ton)	4,5	5	5,5	6	5	11,00	5,00	4,00	2,50	1,60	244,44%	100,00%	72,73%	41,67%	32,00%
		-	Lada (ton)	11,05	11,16	11,28	11,45	15	11,00	11,00	11,00	12,50	12,75	99,55%	98,57%	97,52%	109,17%	85,00%
			Produktivitas tanaman perkebunan :															
		-	Kelapa Sawit (kw/ha)	131	134	137	250	250	0,00	250,05	254,84	259,46	144,10	0,00%	186,60%	186,56%	103,78%	57,64%
		-	Karet (kw/ha)	7,24	7,6	7,98	9	6	7,87	7,87	5,47	5,47	5,48	108,70%	103,55%	68,55%	60,78%	91,33%
		-	Kopi (kw/ha)	10	10,1	10,2	10	10	7,27	7,27	10,00	5,00	4,57	72,70%	71,98%	98,04%	50,00%	45,70%
		-	Lada (kw/ha)	5,34	5,44	5,6	8	6	5,24	5,24	5,79	5,68	5,80	98,13%	96,32%	103,39%	71,00%	96,67%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021





Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke.... (%)					Rata - rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.991.334.111	2.995.982.800	3.331.137.957	2.907.459.600	2.402.602.200	2.915.167.042	2.910.339.613	3.322.809.609	2.892.488.347	2.395.158.913	97,45%	97,14%	99,75%	99,49%	99,69%	2.925.703.334	2.887.192.705
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	944.600.000	1.300.000.000	351.700.000	183.000.000	120.754.000	900.150.477	1.298.254.977	351.428.000	182.997.098	120.747.855	95,29%	99,87%	99,92%	100,00%	99,99%	580.010.800	570.715.681
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	130.080.000	0	0	0	0	129.980.400	0	0	0	0	99,92%	0	0	0	0	130.080.000	129.980.400
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	208.684.300	165.777.700	32.376.143	221.630.000	0	202.263.559	165.777.700	32.376.143	221.608.200	0	96,92%	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%	125.693.629	124.405.120
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	358.764.659	393.039.000	346.065.700	475.502.600	288.727.800	340.903.559	389.406.144	344.635.369	466.648.415	288.582.600	95,02%	99,08%	99,59%	98,14%	99,95%	372.419.952	366.035.217
6	Program Peningkatan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan Perempuan	65.097.000	0	0	0	0	65.097.000	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	65.097.000	65.097.000
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	0	725.152.000	845.172.000	704.159.200	415.000.000	0	706.162.400	841.211.700	696.907.200	414.196.300	0	97,38%	99,53%	98,97%	99,81%	672.370.800	664.619.400
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	336.783.000	1.401.223.500	116.142.000	0	0	330.181.800	1.356.100.899	115.717.000	0	0	98,04%	96,78%	99,63%	0	0	618.049.500	600.666.566
9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan)	15.142.775.100	40.680.510.000	0	0	0	15.124.210.150	39.546.610.599	0	0	0	99,88%	97,21%	0	0	0	27.911.642.550	27.335.410.375
10	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	437.988.700	165.426.500	14.218.593.248	34.803.089.973	22.990.471.450	437.988.700	159.693.400	13.901.898.298	28.240.800.234	22.714.116.516	100,00%	96,53%	97,77%	81,14%	98,80%	14.523.113.974	13.090.899.430
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	196.116.200	708.501.500	15.186.431.000	330.745.400	142.399.750	195.986.200	670.696.793	15.158.540.000	329.713.180	137.904.750	99,93%	94,66%	99,82%	99,69%	96,84%	3.312.838.770	3.298.568.185



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Dinas Pertanian dan Pangan

KAPUAS HULU  
HEBAT!

12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	0	0	107.506.000	0	0	0	0	102.399.900	0	0	0	0	95,25%	0	0	107.506.000	102.399.900
13	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	583.906.600	616.148.000	849.554.000	4.042.622.250	797.669.000	575.461.500	548.830.316	830.956.800	3.947.008.585	716.717.435	98,55%	89,07%	97,81%	97,63%	89,85%	1.377.979.970	1.323.794.927
14	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	755.798.000	448.000.000	1.024.813.000	417.906.000	220.179.000	725.929.300	434.393.600	509.039.500	405.381.158	216.744.389	96,05%	96,96%	49,67%	97,00%	98,44%	573.339.200	458.297.589
15	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	0	189.617.000	0	0	0	0	1.940.856.700	0	0	0		1023,57%	0	0	0	189.617.000	1.940.856.700
16	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.453.934.980	1.996.886.000	1.556.896.000	0	0	2.430.256.350	170.468.141	1.449.446.998	0	0	99,04%	8,54%	93,10%	0	0	2.002.572.327	1.350.057.163
17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	0	0	42.339.000	0	0	0	0	40.153.900	0	0	0	0	94,84%	0	0	42.339.000	40.153.900
18	Program Peningkatan Teknologi Peternakan	106.065.000	0	140.533.000	0	0	105.048.000	0	139.293.600	0	0	99,04%	0	99,12%	0	0	123.299.000	122.170.800
19	Program Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman	231.597.000	57.710.000	187.031.000	0	0	231.288.199	57.710.000	186.417.600	0	0	99,87%	100,00%	99,67%	0	0	158.779.333	158.471.933
20	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Unit Teknis Pertanian	200.000.000	168.430.000	1.782.813.200	180.916.000	125.000.000	196.508.200	160.626.500	1.539.719.900	180.916.000	125.000.000	98,25%	95,37%	86,36%	100,00%	100,00%	491.431.840	440.554.120
	Jumlah	25.143.524.650	52.012.404.000	40.119.103.248	44.267.031.023	27.502.803.200	24.906.420.436	50.515.927.782	38.866.044.317	37.564.468.417	27.129.168.758	99,06%	97,12%	96,88%	84,86%	98,64%	2.815.194.199	2.753.517.356

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

**Tabel 2.5**  
**Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)**

No	Tahun	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Pola Pangan Harapa (PPH)	Keterangan
1	2017	2.277 kalori/kapita/hari	53,90 gram/kapita/hari	57,83	Data Menggunakan Angka Tetap 2016
2	2018	2.043 kalori/kapita/hari	54,63 gram/kapita/hari	65,45	Data Menggunakan Angka Tetap 2017
3	2019	2.259 kalori/kapita/hari	67,48% gram/kapita/hari	71,6	Data Menggunakan Angka Tetap 2018

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021



### 2.3.1. Perkembangan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 7 kecamatan yang sangat rentan pangan dan 11 kecamatan yang agak tahan pangan. Keadaan ini menjadi tolak ukur bagi Bidang Ketahanan Pangan untuk mengurangi jumlah kecamatan yang rentan pangan.

**Tabel 2.6**

**Jumlah Daerah Rentan Pangan Tahun 2020 Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)  
(Keadaan Data Per 31 Desember 2020)**

NO	KODE	KECAMATAN	2020		
			PRIORITAS	KETERANGAN	KETERANGAN SUMBER
1	6108010	SILAT HILIR	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
2	6108020	SILAT HULU	Prioritas 1	Sangat Rentan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
3	6108030	HULU GURUNG	Prioritas 5	Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
4	6108040	BUNUT HULU	Prioritas 6	Sangat Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
5	6108050	MENTEBAH	Prioritas 6	Sangat Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
6	6108060	BIKA	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
7	6108070	KALIS	Prioritas 1	Sangat Rentan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
8	6108080	PUTUSSIBAU SELATAN	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
9	6108090	EMBALOH HILIR	Prioritas 1	Sangat Rentan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
10	6108100	BUNUT HILIR	Prioritas 3	Agak Rawan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
11	6108110	BOYAN TANJUNG	Prioritas 6	Sangat Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
12	6108120	PENGKADAN	Prioritas 6	Sangat Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
13	6108130	JONGKONG	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
14	6108140	SELIMBAU	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
15	6108150	SUHAID	Prioritas 2	Rentan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
16	6108160	SEBERUANG	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
17	6108170	SEMITAU	Prioritas 5	Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
18	6108180	EMPANANG	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
19	6108190	PURING KENCANA	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
20	6108200	BADAU	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
21	6108210	BATANG LUPAR	Prioritas 5	Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
22	6108220	EMBALOH HULU	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu
23	6108230	PUTUSSIBAU UTARA	Prioritas 4	Agak Tahan	FSVA KAB. Kapuas Hulu

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021



Bidang Ketahanan Pangan juga melaksanakan monitoring harga pangan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan permintaan dan penawaran pangan yang ada dipasaran. Pemerintah wajib mengetahui keadaan harga pangan untuk menentukan kebijakan guna menjaga ketahanan pangan masyarakat.

**Tabel 2.7**

**Data Harga Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu (Keadaan Data Per 31 Desember 2020)**

NO	KODE	KECAMATAN	NAMA PANGAN				
			BERAS (Rp)/Kg	JAGUNG (Rp)/Kg	UBI (Rp)/Kg	KACANG (Rp)/Kg	KEDELAI (Rp)/Kg
1	6108010	SILAT HILIR	14.000	12.000	10.000	32.000	0
2	6108020	SILAT HULU	14.000	12.000	8.000	32.000	0
3	6108030	HULU GURUNG	14.000	10.000	8.000	30.000	10.000
4	6108040	BUNUT HULU	14.500	10.000	10.000	30.000	0
5	6108050	MENTEBAH	14.000	10.000	10.000	30.000	0
6	6108060	BIKA	14.000	12.000	8.000	30.000	0
7	6108070	KALIS	14.000	10.000	10.000	28.000	0
8	6108080	PUTUSSIBAU SELATAN	14.500	9.000	10.000	28.000	11.000
9	6108090	EMBALOH HILIR	14.500	10.000	10.000	32.000	0
10	6108100	BUNUT HILIR	14.000	12.000	8.000	32.000	0
11	6108110	BOYAN TANJUNG	15.000	9.000	8.000	30.000	12.000
12	6108120	PENGKADAN	14.000	12.000	10.000	28.000	10.000
13	6108130	JONGKONG	14.000	10.000	8.000	30.000	10.000
14	6108140	SELIMBAU	13.000	12.000	8.000	34.000	10.000
15	6108150	SUHAID	15.000	12.000	10.000	32.000	0
16	6108160	SEBERUANG	12.000	10.000	10.000	32.000	0
17	6108170	SEMITAU	14.000	10.000	10.000	30.000	10.000
18	6108180	EMPANANG	14.000	10.000	10.000	32.000	0
19	6108190	PURING KENCANA	13.500	9.000	10.000	36.000	0
20	6108200	BADAU	14.000	10.000	10.000	30.000	0
21	6108210	BATANG LUPAR	14.000	12.000	8.000	30.000	0
22	6108220	EMBALOH HULU	14.500	12.000	10.000	32.000	10.000
23	6108230	PUTUSSIBAU UTARA	14.000	10.000	10.000	28.000	10.000

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021



### 2.3.2. Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah Kapuas Hulu, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Perluasan Areal Tanam (PAT) dan penganeekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktivitas dan optimalisasi peningkatan pemanfaatan lahan basah, lahan kering, pekarangan, daerah rawa dan irigasi.

**Tabel 2.8**

#### Data Perkembangan Luas Tanam Tanaman Pangan

No	Komoditi	Luas TanamThn/ Ha				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Padi</b>					
	Sawah	10.305	12.099	11.774	9.171	9.001
	Ladang	13.798	13.234	17.054	14.089	13.367
2.	<b>Palawija</b>					
	Jagung	764	1.948	1.244	815	1.235
	Kedelai	64	76	204	6	7
	Kacang Tanah	33	61	25	18	77
	Kacang Hijau	7	1	2	0	0
	Ubi Jalar	54	105	45	76	115
	Ubi Kayu	387	410	428	509	652

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanaman padi mengalami fluktuatif, sedangkan untuk palawijaya konsisten mengalami peningkatan. Peningkatan tanaman palawijaya ini sebagai bentuk keberhasilan Dinas Pertanian dan Pangan dalam menerapkan teknologi pertanian sedangkan produksi padi mengalami fluktuasi akibat cuaca yang kurang menentu.

**Tabel 2.9**

#### Data Perkembangan Produksi Tanaman Pangan

No	Komoditi	Produksi(Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Padi</b>					
	Sawah + Bkn Sawah	56.238	60.510	52.588	24.567,79	23.346,0
2.	<b>Palawija</b>					
	Jagung	204	244	255	1.258	3.190,2
	Kedelai	9	4	5	27	9,3





	Kacang Tanah	34	18,19	28	17	45,8
	Kacang Hijau	5	1	1	1	0
	Ubi Jalar	235	763	387	490	1,901.2
	Ubi Kayu	4,551	4	8.908	11,244	11.001,3

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Produk hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan sehingga menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, baik produk hortikultura yang tergolong produk buah buahan, sayur sayuran, obat obatan maupun tanaman hias.

**Tabel. 2.10**

**Data Perkembangan Luas Tanam Komoditi Hortikultura**

No	Komoditi	Luas TanamThn/ Ha				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Buah - Buahan</b>					
	Belimbing	5,26	5,18	5,14	5,44	5,77
	Langsat	327,95	296,9	295,75	299,73	35,41
	Durian	730,69	695,5	684,59	683,5	662,52
	Jambu Biji	22,9	18,18	17,94	18,5	18,87
	Jambu Air	41,23	31,61	31,31	33,14	34,53
	Jeruk Siam	12,51	10,37	9,92	9,88	9,28
	Jeruk Besar	13,79	7,1	6,94	7,01	6,73
	Mangga	192,42	141,67	141,99	144,68	158,43
	Manggis	106,2	80,63	80,14	75,7	83,13
	Nangka	229,42	220,47	220,61	220,75	281,78
	Nenas	1,35	1,18	1,17	1,22	1,21
	Pepaya	7,24	4,52	4,48	4,73	5,73
	Pisang	84,77	58,79	57,55	58,07	65,16
	Rambutan	436,66	319,92	314,3	318,96	319,68
	Salak	3,1	3	2,76	2,57	2,14
	Sawo	2,99	2,94	2,78	2,82	2,67
	Sirsak	6,14	5,7	5,72	5,8	6,04
	Sukun	16,26	15,01	15,03	16,27	15,79
	Melinjo	4,87	4,82	4,88	4,97	4,76
	Petai	80,93	62,8	59,72	59,9	260,18
	Jengkol	11,94	13,54	14,1	15,45	225,53
<b>2.</b>	<b>Sayur - Sayuran</b>					
	Bawang Daun	11	10	19	22	16
	Petsai/ Sawi	83	71	78	88	86
	Kacang Panjang	281	254	226	257	265
	Cabe Besar	34	49	41	38	163
	Cabe Rawit	127	174	179	177	42
	Tomat	19	26	19	33	41
	Terung	155	142	119	141	172



	Buncis	32	17	10	10	12
	Ketimun	242	229	234	263	291
	Kangkung	139	133	140	141	190
	Bayam	139	136	140	126	148
	Semangka	12	14	12	18	16
	Bawang Merah	0	10	0	6	6
<b>3</b>	<b>Biofarmaka</b>					
	Jahe	23,86	16,06	10,11	9,91	16,81
	Laos/ Lengkuas	8,24	6,63	5,4	5,62	6,59
	Kencur	2,42	0,23	0,16	0,77	0,89
	Kunyit	16,16	9,85	7,25	7,04	12,22
	Lempuyang	0,002	0,002	0,003	0,004	0,01
	Temulawak	1,52	1,76	1,23	0,21	0,28
	Temuireng	0,0023	0,0023	0,0022	0,002	0,002
	Temukunci	0,0303	0,0132	0,0122	0,0102	0,0032
	Dlingo/Dringo	0,0006	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004
	Kapulaga	0	0,0004	0,0002	0	0
	Mengkudu/Pace	0,0391	0,0499	0,0508	0,0242	0,054
	Mahkota Dewa	0,0134	0,012	0,0105	0,0064	0,014
	Kejibeling	0,0021	0,0021	0,002	0,0018	0,0018
	Sambiloto	0,0002	0,0004	0,0004	0,0002	0,0002
	Lidah Buaya	0,002	0,0037	0,005	0	0,0005

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Komoditas Hortikultura mempunyai nilai tinggi dalam bentuk segar, namun demikian produk hortikultura secara umum cepat rusak sehingga memerlukan penanganan khusus untuk menjaga kualitas produk. Penanganan pasca panen yang meliputi sortasi, grading (pengkelasan) dan pengemasan sangatlah penting, hal ini terkait dengan upaya mempertahankan mutu produk. Pengelolaan primer di tingkat petani serta pengelolaan ditingkat industri perlu menerapkan cara pengelolaan yang baik (Good Manufacturing Practises/GMP).

**Tabel 2.11**

**Data Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura**

No	Komoditi	Luas ProduksiThn/ Kuintal				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Buah - Buahan</b>					
	Belimbing	333	334	226	250	392
	Langsat	441	896	505	5.234	5.921
	Durian	5.689	8.336	7.746	24.414	40.673
	Jambu Biji	707	491	339	24.414	896
	Jambu Air	429	371	455	534	560
	Jeruk Siam	692	576	593	1.530	1.807
	Jeruk Besar	390	330	250	666	577
	Mangga	1.679	1.135	1.183	2.217	1.773



	Manggis	231	236	133	211	327
	Nangka	1.773	945	1.822	2.815	2.735
	Nenas	2.320	1.923	1.179	2.569	4.439
	Pepaya	1.072	1.557	1.204	1.119	1.552
	Pisang	17.495	9.243	5.941	10.740	15.187
	Rambutan	478	1.245	1.227	2.521	449
	Salak	86	58	26	30	40
	Sawo	91	71	72	100	42
	Sirsak	257	242	254	255	376
	Sukun	274	186	111	142	209
	Melinjo	60	186	111	142	26
	Petai	232	54	53	26	306
	Jengkoi	104	247	169	258	213
<b>2.</b>	<b>Sayur - Sayuran</b>					
	Bawang Daun	102	50	183	229	142
	Petsai/ Sawi	214	212	851	475	413
	Kacang Panjang	4.708	5.099	3.994	2.546	3.514
	Cabe Besar	167	506	537	334	577
	Cabe Rawit	1.774	3.115	3.341	1.955	1.672
	Tomat	124	114	597	304	598
	Terung	5.822	4.020	2.004	1.772	1.993
	Buncis	145	636	55	68	92
	Ketimun	6.496	5.040	5.505	2.850	4.335
	Kangkung	2.411	2.217	1.507	982	2.720
	Bayam	1.499	1.402	898	588	527
	Semangka	689	350	150	83	175
	Bawang Merah	0	39	0	0	36
<b>3</b>	<b>Biofarmaka</b>					
	Jahe	123,66	1.110,47	968,44	776,7	1.754,06
	Laos/ Lengkuas	47,77	469,21	491,76	322,64	1.088,32
	Kencur	32,22	243,75	327,1	76,18	206,63
	Kunyit	108,34	774,07	675,25	483,67	1.593,47
	Lempuyang	4,98	-	0,02	0,26	0,84
	Temulawak	18,88	200,24	280,29	10,47	35,38
	Temuireng	0,1	0,03	0,07	0,2	0,4
	Temukunci	0,21	0,2	0,3	0,21	2,26
	Dlingo/Dringo	0,02	0,02	-	-	0
	Kapulaga	-	0,03	0,08	-	0
	Mengkudu/Pace	2	6,44	13,11	6,48	37,74
	Mahkota Dewa	1,31	2,86	3,88	4,89	35,97
	Kejibeling	0,07	0,03	0,04	-	0
	Sambiloto	0,01	-	0,25	-	0
	Lidah Buaya	0,09	0,14	0,27	0,82	0

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021



### 2.3.2. Perkembangan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu

Di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikembangkannya berbagai komoditi perkebunan antara lain karet, kelapa, kopi, lada, coklat (kakao), kapuk, tebu, aren/enau, pinang dan jarak. Belum semua komoditi perkebunan tersebar disetiap kecamatan. Hanya perkebunan karet, kelapa dan lada saja yang tersebar diseluruh kecamatan. Tanaman produktif untuk komoditi perkebunan secara umum menunjukkan angka bervariasi. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.12**

#### Luas Areal Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)			
		2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	88.851,15	80.156,26	88.422,51	87.713,51
2	Karet	49.322	49.310	47.316	47.316
3	Lada	39	37	44	48
4	Kopi	25	25	17	23
5	Kakao	236	245	143	118
6	Kelapa	122	140	78	78,1
7	Aren	110	112	55	53
8	Tebu	14	9	9	6,5
9	Pinang	3	2	3	3,5
10	Kapuk	8	9	3	1,75

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Produksi perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu di dominasi oleh komoditas kelapa sawit dan karet. Komoditas sawit yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu hampir semuanya dimiliki oleh perusahaan sehingga jumlah produksi tidak berpengaruh banyak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.13**

#### Jumlah Produksi Perkebunan

No	Komoditi	Jumlah Produksi			
		Satuan Dalam (Ton)			
	Tahun	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	1.130.610,00	748.458,87	954.224,80	993.465,57
2	Karet	16.948	12.679	12.679	12.746
3	Lada	11	11	13	12.75
4	Kopi	3	4	4	1.6



5	Kakao	54	25	25	2.0
6	Kelapa	42	21	21	3.35
7	Aren	7	2	3	2.47
8	Tebu	2	2	2	0.8
9	Pinang	1	1	1	0.32
10	Kapuk	5	4	4	0

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

#### 2.3.4. Perkembangan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu

Kondisi percepatan populasi dan produksi ternak belum optimal, hal ini masih disebabkan masih lemahnya permodalan, ilmu pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola usahanya. Kondisi perkembangan populasi dan produksi peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini:

**Tabel 2.14**

#### Rekapitulasi Data Pemasukan Ternak

No	Jenis Ternak	Pemasukan (Ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Ternak Besar</b>					
	Sapi	103	47	65	153	89
2.	<b>Ternak Kecil</b>					
	Kambing	77	132	25	171	178
	Babi	230	145	43	536	635
3	<b>Ternak Unggas</b>					
	Ayam Buras	131	-	-	-	0
	Ayam Ras Pedaging	575.091	647.853	653.324	1.150.854	1.026.405
	Itik	1.350	150	450	1.280	99
	<b>Jumlah</b>	<b>577.582</b>	<b>648.927</b>	<b>653.907</b>	<b>1.157.029</b>	<b>1.033.716</b>

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Akselerasi Pengembangan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu ditempuh dengan pengadaan bibit unggul ternak seperti sapi, babi, dan kambing, perluasan padang penggembalan, perbaikan ransum ternak dan pelayanan masyarakat veteriner. Kebutuhan daging dan telur bagi masyarakat sekaligus meningkatkan gizi serta pendapatan peternak.

**Tabel 2.15**

#### Rekapitulasi Data Populasi Ternak

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Ternak Besar</b>					
	Sapi	7.548	7.673	8.487	6.094	6.756



<b>2.</b>	<b>Ternak Kecil</b>					
	Kambing	5.359	1.666	1.155	974	1238
	Domba	10	10	17	7	0
	Babi	23.485	23.806	16.624	17.651	17.002
<b>3</b>	<b>Ternak Unggas</b>					
	Ayam Buras	164.499	165.694	149.644	137.772	118.320
	Ayam Ras Petelur	846	1046	0	4.035	7.293
	Ayam Ras Pedaging	571.891	647.853	653.324	1.150.854	1.026.405
	Itik	5.144	3947	3029	4.868	4.460
	<b>Jumlah</b>	<b>771.234</b>	<b>844.022</b>	<b>823.793</b>	<b>1.316.161</b>	<b>1.181.474</b>

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Produksi ternak ini merupakan segala kegiatan peternakan yang terkait untuk tujuan produksi. Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah bagaimana membuat hewan ternak dapat menghasilkan output yang berkualitas. Untuk menghasilkan output yang berkualitas tersebut tentunya diperlukan pengetahuan tentang nutrisi ternak, kesehatan ternak, serta pengolahan produksi ternak itu sendiri dengan pengelolaan limbah yang baik.

**Tabel 2.16**

**Rekapitulasi Data Produksi Ternak**

No	Jenis Ternak	Produksi (Kg)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Ternak Besar</b>					
	Sapi	134.308	138.709	136.280	155.706	161.777
<b>2.</b>	<b>Ternak Kecil</b>					
	Kambing	1.501	2.577	2.478	2.535	3.991
	Babi	119.574	121.867	119.369	168.755	132.064
<b>3</b>	<b>Ternak Unggas</b>					
	Ayam Buras	193.815	150.763	151.290	83.017	39
	Ayam Ras Petelur	874.924	980.336	987.848	1.450.028	1.222.091
	Ayam Ras Pedaging	341	371	386	1.673	977
	Itik	315	223	225	4.893	2.635
	<b>Jumlah</b>	<b>1.324.778</b>	<b>1.394.846</b>	<b>1.397.876</b>	<b>1.866.607</b>	<b>1.523.574</b>

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa kasus penyakit yang penyebarannya cukup tinggi dan berbahaya. Penyakit rabies sampai tahun 2020 masih ada kasusnya sedangkan pada tahun 2021 ada penyakit African Swine Fever (ASF) yaitu penyakit pada babi yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100 % sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar.



Tabel 2.17

**Rekapitulasi Data Kejadian Penyakit Hewan Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Dan  
Laporan Isikhnas Kabupaten Kapuas Hulu**

No.	NAMA PENYAKIT	JENIS HEWAN	TAHUN			LOKASI		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Rabies	Anjing	1	1	1	Seberuang	Silat Hilir	Batang Lupar, embaloh Hulu
2.	Brucellosis	Sapi	0	0	0	-	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Bunut Hulu	-
3.	Avian Influenza	Ayam	0	0	0	Pts Utara, Pts Selatan, Badau	-	-
		Ayam	72	-	-	-	-	-
4.	Antraks	Sapi	0	0	0	-	-	-
5.	Paratuberculosis	Sapi	0	1	0	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Jongkong	Putussibau Selatan	
6.	Fasciola	Sapi	44	71	0	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Jongkong	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Bunut Hulu	-
7.	Hog Cholera	Babi	2	2	5	Putussibau Selatan	Putussibau Utara	-
						-	-	Putussibau Selatan
8.	SE	Sapi	0	9	0	-	Putussibau Utara, Putussibau Selatan	-
9.	Helminthiasis	Sapi	102	233	331	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Jongkong	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Bunut Hulu, kalis	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Hulu Gurung, Semitau, Bunut Hilir Jongkong, Embaloh Hilir, Badau, Embaloh Hulu, Puring Kencana Empanang.





10.	Salmonella Pullorum	Sapi	22	30	0	Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Mentebah, Jongkong	Putussibau Utara, Putussibau Selatan	-
11.	Salmonella Enteridis	Ayam	16	32	0	Badau	Putussibau Utara,	-
12.	Mycoplasma	Ayam	0	18	0		Putussibau Selatan	-
Jumlah			484	625	337			

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

### 2.3.5. Perkembangan Penyuluh Kabupaten Kapuas Hulu

Seiring tumbuh dan berkembang dinamika kelompok tani yang fungsinya sebagai Kelas belajar, Unit Produksi dan Wadah Kerjasama, tujuan kelompok tani harus mampu sebagai better farming, better business, better living dan better communication. Keberadaan kelompok tani yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 1123 kelompok tani, 123 gabungan kelompok tani dan 23.090 anggota.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Kelompok Tani (POKTAN) di Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Kecamatan	GAPOKTAN					POKTAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Putussibau Utara	8	11	11	9	9	66	74	80	86	88
2	Putussibau Selatan	3	2	13	13	13	110	112	129	135	133
3	Bika	4	2	6	6	6	41	44	51	46	46
4	Kalis	4	3	7	7	7	73	99	103	120	121
5	Mentebah	8	9	6	6	6	39	49	56	71	76
6	Boyan Tanjung	5	5	10	9	9	51	63	84	93	93
7	Pengkadan	4	5	11	11	11	72	88	106	96	96
8	Hulu Gurung	7	7	14	14	14	78	83	106	92	94
9	Seberuang	11	10	7	7	7	74	88	88	90	90
10	Semitau	8	11	5	1	6	20	17	18	18	26
11	Suhaid	9	7	2	2	2	25	17	25	23	24
12	Selimbau	14	14	6	4	4	44	27	41	32	33
13	Jongkong	7	11	9	9	9	61	69	88	76	76
14	Bunut Hilir	9	10	5	4	4	23	21	32	36	36
15	Bunut Hulu	6	6	7	7	7	66	70	93	95	95
16	Embaloh Hilir	6	6	5	5	5	36	36	40	39	39
17	Embaloh Hulu	6	6	5	5	5	42	46	46	42	42
18	Batang Lupar	13	13	5	5	5	38	43	43	48	48
19	Badau	5	5	4	2	2	28	23	24	27	27
20	Empanang	5	5	1	1	1	4	3	6	12	12
21	Puring Kencana	3	2	3	3	3	22	24	24	25	25
22	Silat Hilir	1	1	11	11	11	66	68	69	70	75
23	Silat Hulu	5	3	13	10	10	59	59	66	72	73
Jumlah		151	154	166	151	156	1.138	1.223	1.418	1.444	1468

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021



Seiring dengan perkembangannya, anggota kelompok tani mengalami perkembangan dan juga berkurang. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Pangan untuk bisa selalu menjaga jumlah anggota Kelompok Tani guna melaksanakan fungsi kontrol dan pembinaan sehingga dapat memperoleh ilmu dan teknologi pertanian baru yang moderen.

**Tabel 2.19**

**Perkembangan Anggota Kelompok Tani di Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Kecamatan	Anggota Kelompok Tani				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Putussibau Utara	1.307	1.751	1.258	987	987
2	Putussibau Selatan	2.258	2.333	2.535	2.550	2550
3	Bika	837	894	648	675	675
4	Kalis	1.152	2.178	1.457	1.222	1222
5	Mentebah	734	1.071	998	1.305	3360
6	Boyan Tanjung	1.023	1.305	1.466	1.283	1283
7	Pengkadan	1.299	1.887	2.393	1.738	1738
8	Hulu Gurung	1.873	2.056	2.376	2.202	3390
9	Seberuang	1.540	1.805	967	1.013	1013
10	Semitau	420	420	50	50	331
11	Suhaid	537	399	114	284	284
12	Selimbau	850	661	287	342	342
13	Jongkong	1.267	1.435	1.547	1.514	1514
14	Bunut Hilir	338	502	363	425	425
15	Bunut Hulu	1.489	1.769	1.286	1.478	1478
16	Embaloh Hilir	825	825	600	600	9807
17	Embaloh Hulu	894	1.012	625	608	608
18	Batang Lupar	830	983	524	516	516
19	Badau	530	520	166	182	182
20	Empanang	39	39	39	39	39
21	Puring Kencana	387	442	246	272	272
22	Silat Hilir	1.471	1.572	1.572	1.625	1625
23	Silat Hulu	1.411	1.411	1.221	1.326	1326
Jumlah		23.311	27.270	22.738	22.236	34.967

Sumber: Database Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

### 2.3.6. Perkembangan UPTD Kabupaten Kapuas Hulu

Unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Induk (BBI) Kelansin adalah merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional teknis Dinas dilapangan. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan program-program Dinas Pertanian. Tanaman Pangan dalam pengembangan perbanyak benih dan bibit unggul bermutu guna mengakselerasikan agroinfut dibidang agribisnis.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional teknis dinas di lapangan yang terletak di Dusun Kelansin Desa Tekalong Kecamatan Mentebah. Keberadaan UPTD-BPP Kelansin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berfungsi secara optimal baik dari kualitas maupun kuantitas.



Balai Pembenihan dan Pembibitan Kelansin sebagai operasional teknis dinas melaksanakan program-program Dinas Pertanian dalam pengembangan perbanyakan benih dan bibit yang bermutu guna mengakselerasikan agroinput dibidang agribisnis (usahatani) khusus perbenihan dan pembibitan bidang tanaman pangan, hortikultura buah-buahan, sayuran dan peternakan.

Program yang telah dikembangkan di UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Penataan lahan penangkaran benih dan bibit tanaman
- Perbanyakan benih/bibit tanaman
- Pengembangan sumberdaya bidang penangkaran
- Pembangunan Infrastruktur sarana prasarana pertanian.

**Tabel 2.20**

**Data Perkembangan Keadaan UPTD-BPP Kelansin Kecamatan Mentebah Tahun 2021**

No.	Bidang Usaha	Komoditas yang dikembangkan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<u>Bidang Tanaman Pangan</u> a. Penangkaran :	1) Padi 2) Jagung 3) Kedelai 4) Ubi Jalar 5) Ubi Kayu	0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha	Hasil Minim faktor : - Pengairan belum cukup - Serangan Hama Tikus  Kondisi lahan baru & belum dapat ditanami dengan baik, masih tahap pengelolaan secara bertahap.
	<u>Bidang Tanaman Hortikultura</u> a. Pembibitan :	1) Durian 2) Mangga 3) Lengkek 4) Jeruk 5) Sirsak	51 Pokok 0 Pokok 45 Pokok 13 Pokok 0 Pokok	Belum ada pohon induk yang dapat dijadikan bahan perbanyakan baik stek/okulasi
	b. Tanaman Pohon Induk Buah-buahan	1) Durian 2) Mangga 3) Manggis 4) Salak 5) Rambutan 6) Kelengkeng 7) Jeruk 8) Jambu Air 9) Sawo 10) Kedondong 11) Belimbing 12) Langsung	0 Pohon 3 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 2 Pohon 6 Pohon 12 Pohon 6 Pohon 2 Pohon 2 Pohon 0 Pohon 6 Pohon	Semua komoditas yang ditanam khusus dipersiapkan untuk pohon induk.



		14) Petai	0 Pohon	
		15) Empakan	0 Pohon	
		16) Cempedak	0 Pohon	
		17) Pisang	0 Pohon	
		18) Rambai	0 Pohon	
		19) Nangka	0 Pohon	
		20) Sirsak	0 Pohon	

Sumber : BPP Klansin Dalam Data Tahun 2021

Sedangkan kondisi lahan UPTD-BPP Kelansin masih memungkinkan untuk dikembangkan, dan keragaan pengembangan dan penataan lahan BPP Kelansin dapat dilihat pada tabel 2.20 sebagai berikut ini:

**Tabel 2.21**

**Kondisi Penggunaan Lahan UPTD-BPP Klansin Kecamatan Mentebah Tahun 2021**

No.	Penggunaan Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)	Keterangan
1.	Lahan Sawah/Basah	6,27 Ha	✓ Ha baru dibuat petak sawah ✓ 3 Ha masih berupa semak belukar belum terolah (belum dibuat sawah)
2.	Hortikultura	1 ha	Baru diolah lahannya, sistem sorjan baru 0,5 Ha yang dapat ditanam

Sumber : BPP Klansin Dalam Data Tahun 2021

**2.3.7. Perkembangan UPTD Kabupaten Kapuas Hulu**

Kondisi ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan belum menunjukkan kemajuan yang berarti, kondisi ini dapat dilihat dari segi tingkat capaian produksi pertanian yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan keluarga petani.

Sektor Pertanian yang menjadi tumpuan pergerakan utama perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 6,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan primadona dalam pemberian kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara dinamis dan kondusif. Penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar juga merupakan petani sehingga, sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Pengembangan permodalan lewat perbankan mengalami hambatan birokrasi yang buntu, karena kegagalan masa silam diantara kredit usaha tani (KUT) masih belum terselesaikan. Pengembangan permodalan melalui pola Kemitraan belum juga menunjukkan



sinyal yang jelas karena belum ada pengusaha yang benar-benar mengadakan kerjasama dengan petani baik skala kecil, menengah maupun skala besar.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian Kab. Kapuas Hulu mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan ke depan antara lain :

1. Penanganan penduduk rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat dilakukan secara efektif.
2. Kondisi Lahan pertanian yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan.
3. Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing.
4. Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman dan ternak.
5. Masyarakat masih melaksanakan pertanian secara tradisional.
6. Pandemi COVID-19 yang belum ada kepastian kapan berakhir.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan ke depan antara lain :

1. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.
2. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan instansi- instansi vertikal terkait.
3. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)



4. Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.
5. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk pertanian.



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Bidang Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan pertanian dan pangan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1.**

##### Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD

No.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Pertanian dan Pangan	Permasalahan
1.	Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Sistem penyediaan Database belum tertata dan kurang terpadu antar unit kerja, sehingga bahan untuk perumusan kebijakan kurang memadai.
2.	Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Pangan	Koordinasi dengan instansi vertikal sudah cukup baik, tetapi koordinasi internal di lingkup OPD masih lemah, sehingga menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Pangan	Manajemen internal di lingkup OPD baik manajemen organisasi, SDM maupun pengelolaan asset masih lemah, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.
4.	Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).</li><li>2. Cadangan pangan di tingkat pemerintah dan di tingkat rumah tangga belum terpantau.</li><li>4. Pemantauan dan penanganan penduduk rawan pangan belum maksimal.</li><li>5. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi target SPM.</li></ol>





		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Pemantauan dan pengendalian distribusi, harga dan pasokan bahan pangan belum terpadu dengan instansi terkait.</li><li>7. Cakupan pengawasan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan.</li></ol>
5.	Penyelenggaraan urusan pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian</li><li>2. Peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan terkendala penurunan luas lahan fungsional pertanian.</li><li>3. Produk hasil pertanian masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas.</li><li>4. Penjaminan kesehatan hewan dan produk Bahan Asal Hewan (BAH) mutlak dilakukan sebagai kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat.</li><li>5. Keterbatasan sarana dan prasarana Produksi pertanian.</li></ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### A. Visi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

---

---

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,  
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**

---

---

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

- 1) Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
- 2) Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.



- 3) Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
- 4) Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

#### B. Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara- cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.
- 2) Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
- 3) Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.
- 5) Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Terkait tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan maka misi utama yang harus diemban adalah misi nomor dua dan nomor empat yaitu:

1. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.



Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang aman, relegius dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
- 3) Meningkatkan jumlah desa mandiri.
- 4) Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka;
- 5) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
- 6) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 7) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 8) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Tujuan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan ada pada nomor 2 (dua) dan 7 (tujuh). Setelah menentukan tujuan yang menjadi acuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan maka selanjutnya adalah menentukan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan memiliki Indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, memiliki sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan indikatornya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan indikatornya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Selanjutnya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai IKM, merupakan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Hal ini menunjukkan adanya keselaran dalam kinerja pembangunan di Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu.

Strategi yang tertuang dalam RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang digunakan mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan indikatornya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memiliki dominasi



terbesar dalam pembentukan perekonomian daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sektor ini, komoditas unggulan yang memiliki pangsa pasar ekspor seperti kratom, arang, lada biji, bungkil kelapa, langsung dan kelapa bulat. Sektor pertanian apabila diolah dengan baik, mulai dari produksi bahan mentah, mengolahnya menjadi barang mentah, setengah jadi maupun jadi, kemudian proses distribusi yang baik akan menghasilkan komoditi ekonomi kerakyatan.

Strategi yang tertuang dalam RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang digunakan mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana. Strategi yang digunakan mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu peningkatan sistem pelayanan publik

### **3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Lembaga Terkait**

#### **3.3.1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian**

---

---

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

---

---

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan,
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

#### **3.3.2. Renstra Kementrian Pertanian RI Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024) tertuang Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :
  - a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),



- b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
  - c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/ hari hingga tahun 2024,
  - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
  - e. Prevalence of Under-nourishment/ P o U ( P r e v a l e n s i Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
  - f. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024), Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),
  - g. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
  - h. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
  - i. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :
- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),
  - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
  - c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
  - d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
  - e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :
- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
  - b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,



- 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
  - a. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

### **3.3.3. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

**“ Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan”**

Untuk mencapai tujuan maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

**“Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal”**

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

**“Menguatkan Pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan, menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumber daya lokal”**

Arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

**“Pemantapan Ketahanan Pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan”**

### **3.3.4. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan



- 3) Meningkatnya produksi tanaman pangan
- 4) Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura
- 5) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Hortikultura
- 6) Meningkatnya produksi tanaman hortikultura

Untuk mencapai tujuan maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya produktivitas padi sawah
- 2) Meningkatnya produktivitas jagung
- 3) Meningkatnya produktivitas kedelai
- 4) Peningkatan produksi tanaman palawija lainnya
- 5) Meningkatnya indeks pertanaman padi
- 6) Meningkatnya pengawasan benih tanaman pangan
- 7) Meningkatnya produktivitas benih sumber tanaman pangan
- 8) Menurunnya luas serangan OPT tanaman pangan
- 9) Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian
- 10) Meningkatnya kapasitas kelompok tani
- 11) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan lulusan diklat pertanian
- 12) Meningkatnya luas panen hortikultura
- 13) Meningkatnya produksi florikultura
- 14) Meningkatnya pembinaan pelaku agribisnis hortikultura
- 15) Meningkatnya ketersediaan Benih Hortikultura yang bermutu
- 16) Meningkatnya Pengawasan dan Peredaran Benih Hortikultura
- 17) Menurunnya luas serangan OPT tanaman Hortikultura

### **3.3.5. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuan yaitu meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat dengan sasaran terbagi 2 (dua) yang terdiri dari:

- 1) Meningkatnya produksi komoditas perkebunan
  - a) Strategi: Memfasilitasi usaha perkebunan rakyat yang berwawasan agribisnis serta mendorong peningkatan kinerja perkebunan besar

Arah kebijakan: Mensinergikan sumberdaya perkebunan untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang produktif melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan pengolahan yang baik (GAP & GHP) didukung pengembangan



kemitraan usaha serta penanganan Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim.

2) Meningkatkan pendekatan perkebunan

a) Strategi: Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perkebunan

Arah kebijakan: Mensinergikan Sumberdaya Perkebunan melalui pengembangan SDM & kelembagaan pekebun, diversifikasi, teknologi pasca panen (GMP) dan promosi produk

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada periode pembangunan 2014-2034 sebagai arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah di daerah. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri adalah untuk “Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”. Hal ini tentu sudah menjadi tujuan utama mengingat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan memiliki potensi alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dalam rumusannya, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

1. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
2. pengembangan ekowisata;
3. pengembangan agropolitan;
4. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
5. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
6. pengembangan kawasan perbatasan;
7. pengembangan infrastruktur;
8. penanganan kawasan rawan bencana; dan
9. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan Negara

Kebijakan tersebut membawa pada perencanaan struktur ruang wilayah daerah, khususnya pusat kegiatan dimana terdapat lima pusat kegiatan yakni:

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Kota Badau
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Putussibau





3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Kota Nanga Tepuai dan Semitau
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
  - a) kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
  - b) kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
  - c) kawasan perkotaan Jongkong di Kecamatan Jongkong;
  - d) kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
  - e) kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
  - a) Desa Bika di Kecamatan Bika;
  - b) Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
  - c) Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
  - d) Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
  - e) Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
  - f) Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
  - g) Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
  - h) Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
  - i) Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
  - j) Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
  - k) Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
  - l) Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
  - m) Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;
  - n) Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
  - o) Desa Nanga Dangan di Kecamatan Silat Hulu; dan
  - p) Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid

Dalam RTRW Kapuas Hulu Periode RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan pada tahap II dan III pada tahapan pelaksanaan program RTRW Kabupaten Kapuas Hulu 2014 – 2034 yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Program Utama RTRW Periode Jangka Menengah II dan III Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	
			PJM II	PJM III
<b>A.</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>			
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>			
	<b>1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)</b>			
	a. Perencanaan Detail Kawasan PPLB	Nanga Badau		
	b. Pembangunan Kawasan PPLB	Nanga Badau		
	c. Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan	Nanga Badau		
	d. Penataan Kawasan Kota	Nanga Badau		
	e. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Nanga Badau		



	f. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Badau		
	g. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Nanga Badau		
	h. Konsolidasi Lahan	Nanga Badau		
	i. Penataan daerah perbatasan guna mencegah illegal logging dan trafficking	Nanga Badau		
	<b>1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)</b>			
	a. Perencanaan Detail Kawasan Ibukota Kabupaten	Putussibau		
	b. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan	Putussibau		
	c. Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan	Putussibau		
	d. Penataan Land Mark Kota	Putussibau		
	e. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Putussibau		
	f. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Putussibau		
	g. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Putussibau		
	h. Konsolidasi Lahan	Putussibau		
	<b>1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PKL)</b>			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau		
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau		
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Kota	Nanga Tepuai dan Semitau		
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Tepuai dan Semitau		
	e. Konsolidasi Lahan	Nanga Tepuai dan Semitau		
	<b>1.4 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Nanga Silat, Mentebah, Nanga Bunut, Lanjak		
	<b>1.5 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b>			
	a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya		
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya		
	c. Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ibukota Kec. Lainnya		
	d. Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Ibukota Kec. Lainnya		
2	<b>Perwujudan Sistem Prasarana</b>			
	<b>2.1 Pengembangan Sistem Transportasi</b>			
	• <b>Pengembangan Sistem Transportasi Darat</b>			
	a. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Arteri :			
	(a) Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Simpang Sejiram – Nanga Tepuai – Mentebah – Putussibau	292,19 km		
	(b) Simpang Sejiram – Semitau – Nanga Kantuk	89,2 km		
	(c) Batas Kabupaten Kapuas Hulu – Puring Kencana – Nanga Kantuk – Badau – Lanjak – Simpang Mataso – Tanjung Kerja – Putussibau – Nanga Bungan – Batas Kalimantan Timur	296,36 km		



	b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor :			
	(a) Jln. Ahmad Yani (Putussibau)	2,34 km		
	(b) Jln. Yos Sudarso (Putussibau)	0,45 km		
	(c) Nanga Kantuk – Sungai Tembaga	18,6 km		
	(d) Badau – Sungai Tembaga	17,9 km		
	(e) Simpang Silat – Nanga Silat	13,2 km		
	(f) Benua Martinus – Ulak Pauk	17,8 km		
	(g) Kedamin – Bika	19,1 km		
	(h) Bika – Manday	3,17 km		
	(i) Bongkong – Nanga Dangan	12,5 km		
	(j) Kenerak – Selimbau	25,0 km		
	(k) Lingkar Mupa – Transmigrasi	1,63 km		
	(l) Lingkar Dalam Kota Bika	0,68 km		
	(m) Mataso – Sadap	4,0 km		
	(n) Nanga Kantuk – Langau	51,6 km		
	(o) Nanga Kantuk – Nanga Silat	68,0 km		
	(p) Semitau – Suhaid	10,3 km		
	(q) Simpang Sekubah – Jongkong	23,2 km		
	(r) Sungai Tembaga – Empaik	13,0 km		
	(s) Tepuai – Nanga Taman	13,6 km		
	c. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal	522,88 km		
	d. Pembangunan dan Peningkatan Terminal			
	(a) Terminal B	Nanga Badau, Kedamin		
	(b) Terminal C	Putussibau, Semitau, Nanga Tepuai		
	e. Pengembangan Dermaga Sungai	Putussibau Kota, Nanga Bunut,		
		Semitau, Jongkong, Lanjak, Nanga Silat		
	f. Pembangunan Rel Kereta Api Pontianak - Putussibau			
	• <b>Pengembangan Sistem Transportasi Udara</b>			
	a. Peningkatan Bandar Udara Pangsuma	Putussibau Utara		
	b. Penyusunan aturan Zonasi Kawasan sekitar Bandara Pangsuma	Putussibau Utara		
	c. Pembangunan Bandar Udara Perintis Badau	Badau		
	d. Pembangunan Bandar Udara Khusus TNI AU	Nanga Awin		
	<b>2.2 Pengembangan Jaringan Energi</b>			
	• <b>Pengembangan Jaringan Listrik</b>			
	a. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Silat Hulu, Hulu Gurung, Semitau, Selimbau, Jongkong, Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Putussibau Selatan, Batang Lupa, Badau, Empanang		
	b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Putussibau Selatan		
	c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB)	Mentebeh		
	d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)	Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Batang Lupa, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan, Pengkadan, Silat Hulu, Embaloh Hulu, Puring Kencana, Empanang		



	e. Peningkatan dan perluasan Jaringan Distribusi	Seluruh Kec.		
	• <b>Peningkatan Sistem Distribusi BBM</b>			
	a. Peningkatan kapasitas Depo BBM	Putussibau		
	b. Pembangunan Fasilitas Penyimpanan BBM untuk Mendukung PLTD, Transportasi	Putussibau		
	c. Pengembangan Jaringan Distribusi BBM untuk Kebutuhan Domestik	Seluruh Kec.		
	<b>2.3 Jaringan Sumberdaya Air</b>			
	• <b>Konservasi Sumberdaya Air</b>			
	a. Penataan Kawasan Lindung sekitar Mata air	Seluruh Kec.		
	b. Perlindungan Kawasan Tangkapan Air	Seluruh Kec.		
	c. Penetapan Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh kec.		
	• <b>Pendayagunaan Sumberdaya Air</b>			
	a. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Bersih	Nanga Tepuai, Nanga Dangan, Serijam, Semitau, Badau, Putussibau, Jongkong, Mentebah		
	b. Peningkatan Jaringan Pelayanan Air bersih	Seluruh Kec.		
	c. Pembangunan Irigasi	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Imbal Jasa Hulu Hilir (Payment Watersheet Services)	Sungai Mendalam		
	• <b>Pengendalian Daya Rusak Air</b>			
	a. Pembangunan sarana bendungan pengendali banjir	Hulu Tabuk, Lubuk Antuk, Riam Panjang, Sukamaju-Lunsana, Ukit-Ukit, Toalang		
	<b>2.4 Jaringan Telekomunikasi</b>			
	a. Pembangunan jaringan sistem teresterial/kabel	Seluruh Kec.		
	b. Pembangunan jaringan sistem satelit dengan Broadband	Seluruh Kec.		
	c. Pembangunan BTS untuk telepon seluler	Seluruh Kec.		
	d. Pembangunan Basis data spasial dan jaringan sistem informasi penyelenggaraan kegiatan penataan ruang terpadu	Seluruh Kec.		
	<b>2.5 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah</b>			
	a. Pembangunan TPA Modern Skala kabupaten	Badau		
	b. Pembangunan TPS Skala Kecamatan	Seluruh Kec.		
	<b>2.6 Pengembangan Sistem Pengelohan Limbah</b>			
	Pembangunan UPL Modern Skala Kabupaten	Badau		
<b>B.</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>			
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>			
	<b>1.1 Pemantapan Kawasan Hutan Lindung</b>			
	a. Pemantapan Hutan Lindung	Seluruh Kec.		
	b. Penetapan Alih Fungsi Lahan			
	<b>1.2 Pemantapan Kawasan Yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya</b>			
	a. Kawasan Bergambut	Batang Lupar, Bika, Bunut Hilir, Danau Sentarum, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Jongkong, Putussibau Utara		
	b. Kawasan Resapan Air	Seluruh Kec.		
	<b>1.3 Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat</b>			
	a. Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh Kec.		



	b. Kawasan Sekitar Danau dan Danau Lindung	Seluruh Kec.		
	c. Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kec.		
	<b>1.4 Pemantapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya</b>			
	a. Pemantapan Kawasan TNBK	TNBK		
	b. Pemantapan Kawasan TNDS	TNDS		
	c. Pemantapan Kawasan Cagar Budaya			
	d. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	TNDS dan sekitarnya		
	<b>1.5 Pemantapan Kawasan Rawan Bencana</b>			
	a. Penetapan kawasan rawan bencana	Seluruh Kec.		
	b. Penetapan aturan zonasi kawasan rawan bencana	Seluruh Kec.		
	c. Penetapan zona-zona evakuasi	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan sistem penanganan dan mitigasi bencana	Seluruh Kec.		
	<b>1.6 Pemantapan Kawasan Lindung Lainnya</b>			
	a. Kawasan koridor satwa dilindungi	Batang Lupar, Embaloh Hulu		
	b. Kawasan Perlindungan Masyarakat Setempat/Hutan Lindung Adat/Hutan Kelola Masyarakat	Seluruh Kec.		
	c. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk jasa lingkungan	Seluruh Kec.		
<b>2</b>	<b>Pengembangan Kawasan Budidaya</b>			
	<b>2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>			
	a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan hutan produksi	Seluruh Kec.		
	b. Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Konversi/Restorasi Ekosistem	Bunut Hilir, Bunut Hulu, Bika, Mentebah, Boyan Tanjung, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Semitau, Silat Hilir		
	c. Pengembangan Hutan Desa	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Hutan Penghasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Seluruh Kec.		
	e. Penetapan Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Seluruh Kec.		
	<b>2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian</b>			
	a. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	Seluruh Kec.		
	b. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering	Seluruh Kec.		
	c. Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kec.		
	e. Pengembangan Kawasan Peternakan	Seluruh Kec.		
	f. Pengembangan budidaya madu hutan	Seluruh Kec.		
	g. Penetapan Kawasan Pertanian Abadi/Lahan Basah Irigasi Teknis	Seluruh Kec.		
	<b>2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan</b>			
	a. Pengembangan perikanan tangkap	Selimbau, Batang Lupar, Bunut Hilir, Jongkong, Embaloh Hilir, Silat Hilir, dan Suhaid		



	b. Pengembangan budidaya perikanan kolam	Pengkadan, Hulu Gurung, Boyan Tanjung, Bunut Hulu		
	c. Pengembangan budidaya perikanan karamba	Selimbau, Bunut Hilir, Jongkong, Batang Lumpar, Badau, Embaloh Hilir, Bika, Kalis, Seberuang		
	d. Pengembangan kawasan ikan hias Arwana	Suhaid, Semitau, Kedamin, Bika,		
	e. Penerapan teknologi budidaya ikan bernilai ekonomi tinggi	Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Boyan Tanjung, BatangLumpar		
	<b>2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>			
	a. Inventarisasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan	Bunut Hulu, Bunut		
	Pertambangan	Hilir, Hulu Gurung, Selimbau, Suhaid, Kalis, Mentebah, Pengkadan		
	<b>2.6 Kawasan Peruntukan Industri</b>			
	a. Perencanaan dan Penetapan Kawasan Agroindustri	Putussibau Utara, Semitau, Nanga Tepuai, Badau		
	b. Pengembangan <i>home industry</i>	Seluruh Kec		
	<b>2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>			
	a. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata	Seluruh Kec.		
	b. Promosi dan networking	Seluruh Kec.		
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Seluruh Kec.		
	d. Penataan kawasan wisata alam dan budaya	Seluruh Kec.		
	e. Penataan Kawasan Ekowisata Danau Sentarum	TNDS dan sekitarnya		
	f. Penyusunan Blue Print Ekowisata	Seluruh Kec.		
	g. Peningkatan daya tarik obyek wisata	Seluruh Kec.		
	<b>2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan</b>			
	a. Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan	PKSN, PKW, PKL, PPK		
	b. Penataan Lingkungan Permukiman Skala besar	Seluruh Kec.		
	c. Revitalisasi sarana dan prasarana perkotaan	Seluruh Kec.		
	d. Pengembangan Manajemen Pertanahan Perkotaan	Seluruh Kec.		
	e. Pemetaan status tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.		
	f. Penatagunaan tanah perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kec.		
	g. Revitalisasi Kawasan Permukiman Terpencil	Seluruh Kec.		
<b>C.</b>	<b>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>			
1	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi	Agropolitan Silat Hilir dsk		
2	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan	Kawasan Ekowisata TNDS dan sekitarnya		
3	Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Lingkungan	Koridor TNDS-TNBK		



Sumber: RPJMD Kab. Kapuas Hulu Periode 2021-2026

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Menggunakan Analisis SWOT

Isu-isu strategis tidak bisa terlepas dari keberhasilan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan yang telah dicapai hingga saat ini. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisa terhadap kondisi lingkungan internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness), serta memperhatikan kondisi eksternal berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis internal ini bertujuan untuk memetakan kekuatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam potensi pembangunan, serta mengenali dan memahami kelemahan dan kekurangan agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan, sedangkan Analisis eksternal untuk memetakan peluang dan ancaman yang akan dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan.

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut digunakan metode Analisis SWOT, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

#### **Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)**

LINGKUNGAN INTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.	1. Kondisi Lahan pertanian yang masih tersebar/ tidak dalam satu hamparan.
2. Adanya Komitmen Pimpinan untuk Peningkatan Produksi Sektor Pertanian.	2. Pengaruh perubahan iklim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman.
3. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pertanian dan Pangan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN	3. Penanganan desa rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat dilakukan secara efektif.
4. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.	4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan yang Lengkap, baik dan cenderung mahal.
	5. Kecenderungannya Masyarakat Belum dapat memanfaatkan lahan pertanian



5. Tersedianya Komoditas Unggulan di Sektor Pertanian.	secara optimal. 6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bandingkan Ruang Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan yang luas dan beragam. 7. Pertumbuhan Produksi yang Masih Fluktuatif. 8. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang berkualitas.
<b>LINGKUNGAN EKSTERNAL</b>	
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>	<b>ANCAMAN (THREATS)</b>
1. Potensi areal Pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu untuk Perluasan Areal Pertanian. 2. Terjalinnnya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan instansi - instansi vertikal terkait serta mitra kerja (petani, pulau agribisnis, penyedia saprodi, dll). 3. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. 4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat. 5. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian masih terbuka luas. 6. Adanya inovasi teknologi dan informasi untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian. 7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian. 8. Dukungan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan APBN.	1. Penurunan Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian. 2. Alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian produktif oleh berbagai kepentingan. 3. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) seperti hama dan penyakit. 4. Dampak dari perubahan iklim yang menimbulkan potensi bencana alam seperti banjir. 5. Kemandirian petani yang masih rendah dimana pola pikir petani masih berorientasi bantuan sehingga sulit untuk mandiri serta Sulitnya petani menerima inovasi dan teknologi pertanian. 6. Rendahnya minat generasi muda untuk bertani.



Berdasarkan Analisis SWOT dengan Faktor Internal dan Eksternal yang sudah diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Startegis S – O yaitu strategis yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang.
2. Strategis W – O yaitu strategis yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang.
3. Strategis S – T yaitu strategis yang menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman.
4. Strategis W – T yaitu strategis yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman.

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal, maka dapat dituangkan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Strategis Faktor Analisis SWOT**

STRATEGIS (S – O)	STRATEGIS (W – O)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggung jawab dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan produksi sektor pertanian.</li><li>2. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan di sektor pertanian.</li><li>3. Optimalisasi kebutuhan pangan masyarakat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya bahan pangan sehat.</li><li>4. Peningkatkan inovasi teknologi dan informasi baru bagi petani dalam meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas pertanian.</li><li>5. Optimalisasi ketersediaan dana yang diperoleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemanfaatan potensi lahan pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian yang baik dan berkualitas.</li><li>2. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal yang disebabkan perubahan iklim terhadap peningkatan hasil pertanian.</li><li>3. Penanganan penurunan jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.</li><li>4. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Pertanian.</li><li>5. Meningkatkan kualitas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi bahan pangan sehat, serta membuka peluang pasar di bidang pertanian.</li><li>6. Peningkatan jumlah produksi sektor pertanian.</li></ol>
STRATEGIS (S – T)	STRATEGIS (W – T)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan inovasi dan teknologi informasi yang baru dengan dukungan dari pemerintah dalam menunjang kegiatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal yang disebabkan perubahan iklim terhadap peningkatan hasil</li></ol>



<p>Dinas Pertanian dan Pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian untuk hasil pertanian yang bermutu dan berdaya saing.</li><li>3. Pembukaan lapangan kerja disektor pertanian sehingga dapat menumbuhkan minta masyarakat maupun generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.</li><li>4. Mewujudkan kemandirian petani agar dapat berswasembada yang berkelanjutan.</li><li>5. Pengendalian terhadap serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) agar tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.</li></ol>	<p>produksi/produktivitas pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Optimalisasi serangan OPT dan kondisi perubahan iklim yang menimbulkan potensi bencana seperti banjir, hama dan penyakit.</li><li>3. Peningkatan kesejahteraan petani.</li><li>4. Pemberdayaan dan penanggulangan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan.</li><li>5. Pembukaan lapangan kerja disektor pertanian sehingga dapat menumbuhkan minta masyarakat maupun generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.</li></ol>
--	---



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masyarakat. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealisme.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka misi yang didukung capaiannya adalah :

1. Misi Nomor 2 yaitu “Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi”.
2. Misi Nomor 4 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga tercapainya tujuan untuk mendukung sasaran pada RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (Lima) tahun periode 2021 - 2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau



kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.

Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah		LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Persen	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
	1.1	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	1.	Skor PPH	Angka	69,56	78	79	80	81	82
			2.	Jumlah Produksi Pertanian							
				Padi Sawah	ton	25.346	26.119,00	26.641,38	27.174,21	27.717,69	28.272,05
				Padi Ladang	ton	29.506	30.661,00	31.274,22	31.899,70	32.537,70	33.188,45
				Jagung	ton	263,81	1.126,00	1.148,52	1.171,49	1.194,92	1.218,82
				Ubi Kayu	ton	8.678,18	18.625,00	18.997,50	19.377,45	19.765,00	20.160,30
				Cabe	ton	230,52	236,29,00	241,01	245,83	250,75	255,76
				Bawang Merah	ton	3,65	3,71	3,78	3,86	3,94	4,01
				Jahe	ton	179,79	184,28	187,97	191,72	195,56	199,47
				Sapi	kilo	121.863,00	123.081,63	124.312,45	125.555,57	126.811,13	128.079,24
				Kambing	kilo	3.951,00	3.970,76	3.990,61	4.010,56	4.030,61	4.050,77
				Babi	kilo	77.027,00	77.412,14	77.799,20	78.188,19	78.579,13	78.972,03
				Ayam Buras	kilo	54.263,00	54.425,79	54.589,09	54.752,83	54.917,09	55.081,84
				Ayam Ras Pedaging	kilo	1.574.928,00	1.582.802,64	1.590.716,65	1.598.670,24	1.606.663,59	1.614.696,91
				Ayam Ras Petelur	kilo	-	326,00	326,65	327,31	327,96	328,62
				Itik	kilo	533,00	534,07	535,13	536,20	537,28	538,35
				Itik manila	kilo	1.444,00	1.446,89	1.449,78	1.452,68	1.455,59	1.458,50
				Telur Ayam Buras	kilo	10.294,00	10.345,47	10.397,20	10.449,18	10.501,43	10.553,94
				Telur Ayam Ras Petelur	kilo	13.326,00	13.392,63	14.062,26	14.132,57	14.203,24	14.274,25
				Kelapa Sawit	ton	1.094.205,47	1.117.062,78	1.139.920,57	1.162.778,35	1.185.636,14	1.208.493,92
				Karet	ton	19,200	19.776	20.369,28	20.980,36	21.609,77	22.258,06
				Kopi	ton	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41
				Lada	ton	12,10	12,46	12,84	13,22	13,62	14,03



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Dinas Pertanian dan Pangan

KAPUAS HULU  
HEBAT!

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Kabupaten KapuasHulu	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	A
2.1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Nilai	25,77	26	26,50	27	27,50	28
		2. Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasar permasalahan pokok (isu pokok) yang senantiasa berkembang maka perlu disusun strategi pembangunan pertanian dan pangan yang berkelanjutan sebagai berikut

1. Peningkatan ketahanan pangan guna mendukung pemulihan ekonomi daerah pasca Pandemi COVID-19 melalui gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.
2. Peningkatan Produksi pertanian melalui :
  - a) Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian.
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan pusat pelatihan bagi penyuluh dan petani.
3. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.
4. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi.
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.
6. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.
7. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan e-government.
9. Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Penanganan Kerawanan Pangan
4. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian
9. Peningkatan Penyuluhan Pertanian.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

**VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil**

**MISI : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi**

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah					
		2.1.1	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	1.	Peningkatan ketahanan pangan guna mendukung pemulihan ekonomi daerah pasca Pandemi COVID-19 melalui gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.	1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Penanganan Kerawanan Pangan 4. Pengawasan Keamanan Pangan
				2.	Peningkatan Produksi pertanian melalui : 1. Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan pusat pelatihan bagi penyuluh dan petani.	1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 3. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian 6. Peningkatan Penyuluhan Pertanian.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Dinas Pertanian dan Pangan

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**



**VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil**

**MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas**

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
4.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					
		4.1.1.	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.	1.	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				2.	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				3.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				4.	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota



				5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
--	--	--	--	---	--



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Misi dan Visi dapat diwujudkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

RENCANA PROGAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1. Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	1. Skor PPH	2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan pangan	0	persen	100%	618.000.000	100%	621.500.000	100%	654.500.000	100%	687.610.000	100%	748.863.500	100%	748.863.500	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu			
		2. Jumlah Produksi Pertanian:	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah kondisi baik	0	Buah	6	618.000.000	9	621.500.000	12	654.500.000	15	687.610.000	18	748.863.500	18	748.863.500	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Padi Sawah (ton)	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	0	Buah	2	130.000.000	3	130.000.000,00	4	136.500.000,00	5	136.500.000,00	6	143.325.000,00	6	143.325.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Padi Ladang (ton)	2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0	Buah	2	200.000.000	3	200.000.000,00	4	210.000.000,00	5	220.500.000,00	6	242.550.000,00	6	242.550.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Jagung (ton)	2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	0	Buah	2	200.000.000	3	200.000.000,00	4	210.000.000,00	5	225.750.000,00	6	248.325.000,00	6	248.325.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Ubi Kayu (ton)	2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	Kegiatan	1	35.000.000	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00	1	51.243.500,00	1	51.243.500,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Cabe (ton)	2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	0	Dokumen	1	53.000.000	1	53.000.000,00	1	55.650.000,00	1	58.275.000,00	1	63.420.000,00	1	63.420.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Bawang Merah (ton)																									
		- Jahe (ton)	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	1886	Angka	1942,58	842.390.660	2000,86	1.576.629.726	2060,88	2.247.442.226	2100	2.486.746.206	2100	2.848.420.826	2100	2.878.420.826	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Sapi (kilo)							Angka Kecukupan Protein	52,2	Angka	53,77		55,38		57,04		57		57		57					
		- Kambing (kilo)	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kebutuhan pangan daerah dengan ketersediaan dan penyaluran pangan	69	Persen	70%	471.014.400	72%	943.115.840	75%	1.293.126.951	76%	1.382.234.404	79%	1.475.957.844	79%	1.505.957.844	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Babi (kilo)	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	Dokumen	1	40.004.400,00	1	44.004.840	1	44.104.851	1	46.310.094	1	50.941.103	1	50.941.103	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Ayam Buras (kilo)	2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0	Ton	0	0	0	300	50.000.000	450	75.000.000	600	100.000.000	600	100.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu			
		- Ayam Ras Pedaging (kilo)	2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	Kegiatan	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000	1	86.515.000	1	95.166.500	1	95.166.500	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Ayam Ras Petelur (kilo)	2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1	Kegiatan	1	116.010.000	1	127.611.000	1	140.372.100	1	154.409.310	1	169.850.241	1	169.850.241	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Itik (kilo)	2	09	03	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0	Lembaga dan/ atau jaringan Distribusi Pangan	0	0	1	200.000.000	2	220.000.000	3	250.000.000	4	280.000.000	5	300.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Itik manila (kilo)	2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0	Lembaga	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Telur Ayam Buras (kilo)	2	09	03	2.01	7	Peningkatan Kelahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	0	Keluarga	0	0	230	250.000.000	250	260.000.000	260	270.000.000	280	280.000.000	290	290.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	Ton	0	90.000.000	12.500	324.000.000	25.000	563.850.000	37.500	675.000.000	50.000	900.000.000	50.000	900.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
		- Kelapa Sawit (ton)	2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	1	90.000.000,00	1	99.000.000,00	1	113.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
		- Karet (ton)	2	9	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
		- Kopi (ton)	2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	Ton	0	0	12.500	150.000.000,00	25.000	300.000.000,00	37.500	450.000.000,00	50.000	600.000.000,00	50.000	600.000.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		

(1)	(2)	(3)				(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		-	Lada (ton)	2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0	Ton	0	0	12.500	75.000.000,00	25.000	150.000.000,00	37.500	225.000.000,00	50.000	300.000.000,00	50.000	300.000.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu
				Kopi	2	09	03	2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dokumen Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	0	Dokumen	0	-	0	0	1	50000000	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	60.500.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu
			2		09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0	Kegiatan	0	-	0	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	60.500.000,00	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu
			2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	75	Persen	76%	281.376.260	78%	309.513.886	80%	340.465.275	82%	374.511.802	85%	411.962.982	85%	411.962.982	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
			2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	40.262.750	1	40.262.750	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12	Kegiatan	15	209.876.260	18	230.863.886	20	253.950.275	25	279.345.302	30	307.279.832	30	307.279.832	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Kegiatan	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	1	64.420.400	1	64.420.400	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase kerawanan pangan yang ditindaklanjuti	100	Persen	100%	96.990.800	100%	151.388.960	100%	207.666.752	100%	266.200.102	100%	507.440.123	100%	507.440.123	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu
			2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Laporan Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1	46.990.800	1	56.388.960	1	67.666.752	1	81.200.102	1	97.440.123	1	97.440.123	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	68.528.250	1	75.381.075	1	82.919.183	1	91.211.101	1	100.332.211	1	100.332.211	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang tertangani	0	Desa	3	50.000.000	4 desa	95.000.000	5 desa	140.000.000	5 desa	185.000.000	5 desa	410.000.000	5 desa	410.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu		
			2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	0	-	1	45.000.000	1	90.000.000	1	135.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Jumlah Pangan Segar Layak Kosumsi	10	Jenis	10	148.133.910	10	164.166.497	10	181.985.221	10	201.796.129	10	223.829.986	10	223.829.986	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu
			2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12	Kegiatan	12	148.133.910	12	164.166.497	12	181.985.221	12	201.796.129	12	223.829.986	12	223.829.986	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1	Lembaga	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	1	64.420.400	1	64.420.400	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	40.262.750	1	40.262.750	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1	48.315.300	1	48.315.300	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	
			2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	19.250.000	1	21.175.000	1	23.292.500	1	25.621.750	1	28.183.925	1	28.183.925	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu	

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Tipe Test Kit	5	24.383.910	5	28.041.497	5	32.247.721	5	37.084.879	5	42.647.611	5	42.647.611	Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Jumlah produktivitas pertanian																
								Padi Sawah	29,02 kw/ha	30,01		30,61		31,22		31,85		32,48		32,48			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Padi Ladang	29,02 kw/ha	19,56		19,95		20,35		20,76		21,17		21,17			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Jagung	48,12 kw/ha	21,52		21,95		22,39		22,84		23,29		23,29			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Ubi Kayu	252,9 kw/ha	261,22		266,44		271,77		277,21		282,75		282,75			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Cabe	10,94 kw/ha	28,06		28,62		29,19		29,78		30,37		30,37			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Bawang Merah	2 kw/ha	9,27		9,46		9,64		9,84		10,03		10,03			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Jahe	106,79 kw/ha	164,15		167,43		170,78		174,2		177,68		177,68			Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu	
								Kelapa Sawit	151 kw/ha	131		133,62		136,29		139,02		141,80		141,80			Bid Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	
								Karet	8,98 kw/ha	5,6		5,712		5,83		5,94		6,06		6,06			Bid Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	
								Kopi	10,5 kw/ha	4,59		4,6818		4,78		4,87		4,97		4,97			Bid Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	
								Lada	6,34 kw/ha	5,9		6,018		6,14		6,26		6,39		6,39			Bid Perkebunan	Kab. Kapuas Hulu	
								Jumlah Pemotongan Ternak																	
								Sapi	803 ekor	811		819		827		836		844		844			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Kambing	279 ekor	280		282		283		285		286		286			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Babi	1881 ekor	1890		1900		1909		1919		1928		1928			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Ayam Buras	38371 ekor	38563		38756		38949		39144		39340		39340			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Ayam ras pedaging	1029365 ekor	1031424		1033487		1035554		1037625		1039700		1039700			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Ayam Ras Petelur	- ekor	233		234		235		237		238		238			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Itik	375 ekor	376		377		377		378		379		379			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
								Itik manila	756 ekor	758		759		761		762		764		764			Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu	
			3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan dengan baik	80	Persen	80%	128.000.000	82%	140.800.000	85%	154.880.000	88%	170.200.000	90%	187.404.800	90%	187.404.800	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Kegiatan	1	64.000.000	1	71.000.000	1	78.000.000	1	83.200.000	1	94.800.000	1	94.800.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Kegiatan	1	64.000.000	1	69.800.000	1	76.880.000	1	87.000.000	1	92.604.800	1	92.604.800	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pada sektor pertanian	74	Persen	74%	10.453.700.000	75%	11.483.700.000	75%	12.616.700.000	75%	13.863.000.000	75%	15.233.930.000	75%	15.233.930.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0	SDG Hewan/ Tanaman	20	100.000.000	20	110.000.000	20	121.000.000	20	133.100.000	20	146.410.000	20	146.410.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	Kegiatan	1	10.000.000.000	1	11.000.000.000	1	12.100.000.000	1	13.310.000.000	1	14.641.000.000	1	14.641.000.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	Kegiatan	1	353.700.000	1	373.700.000	1	395.700.000	1	419.900.000	1	446.520.000	1	446.520.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak bermutu yang digunakan	0	Persen	76%	162.500.000	78%	178.750.000	80%	196.625.000	82%	216.287.500	85%	237.916.250	85%	237.916.250	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0	Kegiatan	1	81.250.000	1	89.375.000	1	98.312.500	1	108.143.750	1	118.958.125	1	118.958.125	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0	Kegiatan	1	81.250.000	1	89.375.000	1	98.312.500	1	108.143.750	1	118.958.125	1	118.958.125	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	0	Unit Usaha	5	24.570.000	7	45.000.000	8	47.500.000	9	50.500.000	10	55.000.000	10	55.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0	Kegiatan	1	4.570.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.500.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	0	Kegiatan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	74	Persen	74%	276.000.000	78%	303.600.000	80%	333.960.000	82%	367.356.000	85%	404.091.600	85%	404.091.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	3000	Ekor Benih/Bibit Ternak	3000	46.000.000	3000	50.600.000	3.000	55.660.000	3.000	61.226.000	3.000	67.348.600	3.000	67.348.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	1	Dokumen	1	46.000.000	1	50.600.000	1	55.660.000	1	61.226.000	1	67.348.600	1	67.348.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3000	Ekor Benih/Bibit Ternak	3000	46.000.000	3000	50.600.000	3.000	55.660.000	3.000	61.226.000	3.000	67.348.600	3.000	67.348.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	200	Ton	200	46.000.000	200	50.600.000	200	55.660.000	300	61.226.000	200	67.348.600	200	67.348.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	3000	Ekor Benih/Bibit Ternak	3000	46.000.000	3000	50.600.000	3000	55.660.000	3000	61.226.000	3000	67.348.600	3000	67.348.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
									Ton Hijauan Pakan Ternak	200		200		200		200		200		200		200			
			3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	Kegiatan	1	46.000.000	1	50.600.000	1	55.660.000	1	61.226.000	1	67.348.600	1	67.348.600	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani yang telah mendapat bantuan benih/bibit ternak	50	Persen	50%	2.000.000.000	51%	2.150.000.000	51%	2.315.000.000	51%	2.496.500.000	52%	2.696.150.000	52%	2.696.150.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	Ekor Benih/Bibit Ternak	900	1.500.000.000	900	1.650.000.000	900	1.815.000.000	900	1.996.500.000	900	2.196.150.000	900	2.196.150.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan pakan ternak yang diadakan dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Ton	5000	500.000.000	5000	500.000.000	5000	500.000.000	5000	500.000.000	5000	500.000.000	5000	500.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100	Persen	100%	39.609.500.000	100%	44.797.699.000	100%	51.569.272.000	100%	58.715.265.000	100%	63.952.061.500	100%	63.952.061.500	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	0	Persen	10%	740.000.000	11%	814.000.000	12%	895.400.000	13%	984.940.000	14%	1.083.434.000	15%	1.083.434.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	0	Ha	10	30.000.000	11	33.000.000	12	36.300.000	13	39.930.000	14	43.923.000	15	43.923.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu



(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	0	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	1	73.205.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0	Kegiatan	1	560.000.000	1	616.000.000	1	677.600.000	1	745.360.000	1	819.896.000	1	819.896.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0	Dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	1	146.410.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara sesuai rencana	100	Buah	154	38.122.000.000	174	43.141.199.000	185	49.736.122.000	204	56.689.300.000	209	61.726.000.000	211	61.726.000.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14	Buah	15	7.062.500.000	16	7.250.000.000	17	9.000.322.000	18	9.169.200.000	19	10.678.500.000	19	10.678.500.000	Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	Buah	1	7.190.500.000	3	7.397.100.000	4	8.736.000.000	5	9.393.400.000	6	10.078.500.000	7	10.078.500.000	Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	73	Buah	110	19.569.000.000	120	22.694.099.000	125	24.799.800.000	130	27.776.700.000	135	30.969.000.000	135	30.969.000.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	Buah	5	1.250.000.000	6	1.550.000.000	7	1.750.000.000	8	1.950.000.000	9	2.150.000.000	9	2.150.000.000	Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	Buah	4	950.000.000	5	1.050.000.000	6	1.150.000.000	7	1.350.000.000	8	1.550.000.000	8	1.550.000.000	Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	Buah	5	1.100.000.000	6	1.400.000.000	7	1.700.000.000	8	1.950.000.000	9	2.100.000.000	10	2.100.000.000	Bid TPH	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	Buah	0	0	0	0	0	0	8	1.500.000.000	0	0	0	0	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	Buah	0	0	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	Buah	14	1.000.000.000	15	1.600.000.000	16	2.400.000.000	17	3.400.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan, Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dikelola	16	Wilayah	16	275.000.000	16	302.500.000	16	332.750.000	16	366.025.000	16	402.627.500	16	402.627.500	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1	Wilayah	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	292.820.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1	Kegiatan	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	1	109.807.500	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	4	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah pengembangan lahan umum dalam kondisi baik	0	Ha	20	472.500.000	24	540.000.000	30	605.000.000	36	675.000.000	40	740.000.000	40	740.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	0	Ha	20	172.500.000	24	200.000.000	30	225.000.000	36	250.000.000	40	275.000.000	40	275.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	0	Ha	20	200.000.000	24	225.000.000	30	250.000.000	36	275.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	0	Kegiatan	10	100.000.000	12	115.000.000	15	130.000.000	18	150.000.000	20	165.000.000	20	165.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	Persen	5%	958.000.000	5%	1.054.500.000	5%	1.157.000.000	5%	1.236.000.000	5%	1.291.000.000	5%	1.291.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	80	Persen	80%	523.000.000	81%	544.500.000	82%	567.000.000	83%	621.000.000	85%	631.000.000	85%	631.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	23	Kecamatan	23	123.000.000	23	134.500.000	23	147.000.000	23	151.000.000	23	161.000.000	23	161.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23	Kecamatan	23	300.000.000	23	300.000.000	23	300.000.000	23	340.000.000	23	340.000.000	23	340.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	23	Kecamatan	23	100.000.000	23	110.000.000	23	120.000.000	23	130.000.000	23	130.000.000	23	130.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan yang diawasi	100	Persen	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	23	Kegiatan	23	50.000.000	23	50.000.000	23	55.000.000	23	55.000.000	23	60.000.000	23	60.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	23	Kegiatan	23	55.000.000	23	60.000.000	23	65.000.000	23	65.000.000	23	70.000.000	23	70.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	2	55.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti	100	Persen	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0	Kegiatan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	Kegiatan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi unit usaha yang diawasi	3	Unit	3	150.000.000	3	160.000.000	4	205.000.000	4	220.000.000	5	240.000.000	5	240.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	20	Kegiatan	20	50.000.000	20	50.000.000	22	60.000.000	22	60.000.000	23	65.000.000	23	65.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23	Kegiatan	23	35.000.000	23	40.000.000	23	45.000.000	23	50.000.000	23	55.000.000	23	55.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1	Dokumen	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	2	55.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	4	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	Kegiatan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	100	Persen	100%	50.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	23	Kegiatan	23	50.000.000	23	55.000.000	23	55000000	23	60.000.000	23	65.000.000	23	65.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	0	Kasus	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Bid Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana pertanian yang dapat dikendalikan	75	Persen	75%	1.335.000.000	77%	1.355.500.000	79%	1.481.600.000	80%	1.567.100.000	85%	1.710.560.000	85%	1.710.560.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100	Persen	100%	1.335.000.000	100%	1.355.500.000	100%	1.481.600.000	100%	1.567.100.000	100%	1.710.560.000	100%	1.710.560.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	23	Ha	23	245.000.000	23	249.500.000	23	256.000.000	23	256.160.000	23	277.000.000	23	277.000.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
			3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	23	Ha	23	100.000.000	23	110.000.000	23	121.000.000	23	133.100.000	23	146.410.000	23	146.410.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23	Ha	23	245.000.000	23	255.000.000	23	235.500.000	23	255.000.000	23	285.000.500	23	285.000.500	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	23	Ha	23	500.000.000	23	500.000.000	23	605.000.000	23	665.500.000	23	732.050.000	23	732.050.000	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	23	Kegiatan	23	245.000.000	23	241.000.000	23	264.100.000	23	257.340.000	23	270.099.500	23	270.099.500	Bid TPH, Perkebunan, Peternakan	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan rekomendasi izin usaha pertanian yang terfasilitasi	100	Persen	100%	460.000.000	100%	542.000.000	100%	624.000.000	100%	706.000.000	100%	788.000.000	100%	788.000.000	Bid. TPH, Perkebunan, Peternakan, Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terbit izin usaha pertaniannya	1	Perusahaan	1	460.000.000	1	542.000.000	1	624.000.000	1	706.000.000	1	788.000.000	1	788.000.000	Bid. TPH, Perkebunan, Peternakan, Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1	Dokumen	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	Bid. TPH, Perkebunan, Peternakan, Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	Kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Bid. TPH, Perkebunan, Peternakan, Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	19	Izin Usaha Pertanian	19	310.000.000	19	372.000.000	19	434.000.000	19	496.000.000	19	558.000.000	19	558.000.000	Bid. TPH, Perkebunan, Peternakan, Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani tingkat madya	1	Persen	1%	800.000.000	1%	810.000.000	1%	820.000.000	1%	830.000.000	1%	1.000.000.000	1%	1.000.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok	1503	Kelompok Tani	1503	800.000.000	1538	810.000.000	1699	820.000.000	1734	830.000.000	1769	1.000.000.000	1769	1.000.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	Lembaga	14	250.000.000	14	260.000.000	14	270.000.000	14	280.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	Lembaga	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	14	BPP	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1	Badan Usaha Milik Petani	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
			3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	14	Sekolah Lapangan	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	Bid. Penyuluh	Kab. Kapuas Hulu		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	2. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	86	Angka	87	22.129.406.322	88	24.003.257.080	89	25.475.341.951	90	27.034.110.767	92	28.686.205.696	92	29.824.450.151	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu		
																										Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		3. Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	3	27	01			Persentase penyerapan keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100%	15.465.649.322	100%	16.770.874.380	100%	17.637.470.981	100%	18.550.202.700	100%	19.511.656.822	100%	20.449.901.278	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01			Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100	Persen	100%	79.028.400	100%	86.931.240	100%	95.624.364	100%	105.186.800	100%	115.705.480	100%	115.705.480	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01			Persentase pemenuhan data kepegawaian	100	Persen	100%	145.187.100	100%	151.955.810	100%	159.401.391	100%	167.591.530	100%	176.600.683	100%	176.600.683	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01			Nilai IKM Dinas Pertanian dan Pangan	70	Angka	80	553.003.000	81	608.303.300	82	669.133.630	83	736.046.993	85	809.651.692	85	809.651.692	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01			Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100	Persen	100%	2.600.000.000	100%	2.800.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.400.000.000	100%	3.600.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	Persen	100%	2.425.797.000	100%	2.668.376.700	100%	2.935.214.370	100%	3.228.735.807	100%	3.551.609.388	100%	3.551.609.388	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01			Persentase aset Dinas Pertanian dan Pangan dalam kondisi baik	70	Persen	71%	659.436.000	72%	695.379.600	73%	734.917.560	74%	778.409.316	75%	826.250.248	75%	826.250.248	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	Dokumen	26	201.305.500	26	221.436.050	26	243.579.655	26	267.937.621	26	294.731.383	26	294.731.383	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8	64.828.500	8	71.311.350	8	78.442.485	8	86.286.734	8	94.915.407	8	94.915.407	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	13.391.400	1	14.730.540	1	16.203.594	1	17.823.953	1	19.606.349	1	19.606.349	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	5.286.600	1	5.815.260	1	6.396.786	1	7.036.465	1	7.740.111	1	7.740.111	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	10.775.600	2	11.853.160	2	13.038.476	2	14.342.324	2	15.776.556	2	15.776.556	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	Dokumen	2	10.964.800	2	12.061.280	2	13.267.408	2	14.594.149	2	16.053.564	2	16.053.564	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	4	25.656.400	4	28.222.040	4	31.044.244	4	34.148.668	4	37.563.535	4	37.563.535	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Dokumen	8	70.402.200	8	77.442.420	8	85.186.662	8	93.705.328	8	103.075.861	8	103.075.861	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44	Dokumen	44	15.465.649.322	44	16.770.874.380	44	17.637.470.981	44	18.550.202.700	44	19.511.656.822	44	20.449.901.278	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	144	Orang	144	14.955.596.922	144	16.209.816.740	144	17.020.307.577	144	17.871.322.956	144	18.764.889.104	144	19.703.133.559	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	Dokumen	8	429.101.200	8	472.011.320	8	519.212.452	8	571.133.697	8	628.247.067	8	628.247.067	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dokumen	4	10.835.000	4	11.918.500	4	13.110.350	4	14.421.385	4	15.863.524	4	15.863.524	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1	31.522.040	1	34.674.244	1	38.141.668	1	41.955.835	1	46.151.419	1	46.151.419	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1	7.150.000	1	7.865.000	1	8.651.500	1	9.516.650	1	10.468.315	1	10.468.315	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu			

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	Dokumen	16	31.444.160	16	34.588.576	16	38.047.434	16	41.852.177	16	46.037.395	16	46.037.395	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10	Dokumen	10	79.028.400	10	86.931.240	10	95.624.364	10	105.186.800	10	115.705.480	10	115.705.480	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	3.630.000	1	3.993.000	1	4.392.300	1	4.831.530	1	5.314.683	1	5.314.683	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	3.905.000	1	4.295.500	1	4.725.050	1	5.197.555	1	5.717.311	1	5.717.311	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	3	4.147.000	3	4.561.700	3	5.017.870	3	5.519.657	3	6.071.623	3	6.071.623	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	2	8.460.100	2	9.306.110	2	10.236.721	2	11.260.393	2	12.386.432	2	12.386.432	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	2	27.261.300	2	29.987.430	2	32.986.173	2	36.284.790	2	39.913.269	2	39.913.269	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	1	31.625.000	1	34.787.500	1	38.266.250	1	42.092.875	1	46.302.163	1	46.302.163	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	145.187.100	6	151.955.810	6	159.401.391	6	167.591.530	6	176.600.683	6	176.600.683	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	Unit	5	2.750.000	5	3.025.000	5	3.327.500	5	3.660.250	5	4.026.275	5	4.026.275	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	77.500.000	1	77.500.000	1	77.500.000	1	77.500.000	1	77.500.000	1	77.500.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	5	23.136.000	5	25.449.600	5	27.994.560	5	30.794.016	5	33.873.418	5	33.873.418	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	3.251.600	1	3.576.760	1	3.934.436	1	4.327.880	1	4.760.668	1	4.760.668	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	Dokumen	6	1.650.000	6	1.815.000	6	1.996.500	6	2.196.150	6	2.415.765	6	2.415.765	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	2	36.899.500	2	40.589.450	2	44.648.395	2	49.113.235	2	54.024.558	2	54.024.558	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	10	Dokumen	10	553.003.000	10	608.303.300	10	669.133.630	10	736.046.993	10	809.651.692	10	809.651.692	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket Kegiatan	1	13.895.200	1	15.284.720	1	16.813.192	1	18.494.511	1	20.343.962	1	20.343.962	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket Kegiatan	1	148.500.000	1	163.350.000	1	179.685.000	1	197.653.500	1	217.418.850	1	217.418.850	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket Kegiatan	1	45.181.400	1	49.699.540	1	54.669.494	1	60.136.443	1	66.150.088	1	66.150.088	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket Kegiatan	1	23.647.800	1	26.012.580	1	28.613.838	1	31.475.222	1	34.622.744	1	34.622.744	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	25.740.000	1	28.314.000	1	31.145.400	1	34.259.940	1	37.685.934	1	37.685.934	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket Kegiatan	1	16.720.000	1	18.392.000	1	20.231.200	1	22.254.320	1	24.479.752	1	24.479.752	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Dokumen	1	42.900.000	1	47.190.000	1	51.909.000	1	57.099.900	1	62.809.890	1	62.809.890	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Dokumen	1	190.163.600	1	209.179.960	1	230.097.956	1	253.107.752	1	278.418.527	1	278.418.527	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	38.555.000	1	42.410.500	1	46.651.550	1	51.316.705	1	56.448.376	1	56.448.376	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	7.700.000	1	8.470.000	1	9.317.000	1	10.248.700	1	11.273.570	1	11.273.570	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Kegiatan	11	2.600.000.000	11	2.800.000.000	11	3.000.000.000	11	3.200.000.000	11	3.400.000.000	11	3.600.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	02	2.08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	03	2.09	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	04	2.10	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	3	1.800.000.000	3	2.000.000.000	3	2.200.000.000	3	2.400.000.000	3	2.600.000.000	3	2.800.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kegiatan	4	2.425.797.000	4	2.668.376.700	4	2.935.214.370	4	3.228.735.807	4	3.551.609.388	1	3.551.609.388	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Dokumen	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.993.000	1	4.392.300	1	4.831.530	1	4.831.530	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Dokumen	1	184.602.000	1	203.062.200	1	223.368.420	1	245.705.262	1	270.275.788	1	270.275.788	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	1	11.055.000	1	12.160.500	1	13.376.550	1	14.714.205	1	16.185.626	1	16.185.626	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	1	2.226.840.000	1	2.449.524.000	1	2.694.476.400	1	2.963.924.040	1	3.260.316.444	1	3.260.316.444	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44	Kegiatan	44	659.436.000	44	695.379.600	44	734.917.560	44	778.409.316	44	826.250.248	44	826.250.248	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu			

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	164.098.000	5	180.507.800	5	198.558.580	5	218.414.438	5	240.255.882	5	240.255.882	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	121.638.000	5	133.801.800	5	147.181.980	5	161.900.178	5	178.090.196	5	178.090.196	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Buah	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	19.800.000	5	21.780.000	5	23.958.000	5	26.353.800	5	28.989.180	5	28.989.180	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Buah	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Buah	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Buah	2	53.900.000	2	59.290.000	2	65.219.000	2	71.740.900	2	78.914.990	2	78.914.990	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	Buah	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
			3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Buah	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ada pada Misi Kedua yaitu Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi. Adapun tujuan yang didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah tujuan kedua yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya sasaran pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan juga memiliki keterkaitan pada misi keempat pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Adapun tujuan yang didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah tujuan ketujuh yaitu Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya sasaran pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Pangan yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut:





Tabel 7.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL										
Misi 1										
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan										
1.1	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	93,66	95	96	97	96,08
	1.1.1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	100	100	100
	1.1.2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	78	80	83	86	88
	1.1.3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	126,64	124,06	121,5	118,9	116,3
	1.1.4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	70	72	75	78	80
Misi 2										
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi										
2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	1,23	2	3	4	5
	2.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
			Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	1,0	1,8	2,6	3,4	4,20
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
			LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	-10,52	2,88	3,24	4,53	5,58
2.2	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri		Persentase Desa Mandiri	%	13,31	15,47	17,63	19,78	21,94	24,10
	2.2.1	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	43	49	55	61	67
2.3	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan	%	8,33	8,08	7,83	7,58	7,33	7,08
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,68	3,51	3,34	3,17	3,00
	2.3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	36,14	36,92	37,68	38,45	39,12
	2.3.2	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	9,30	13,46	17,63	19,99	20,82
	2.3.3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	412	416,12	420,28	424,48	428,73
	2.3.4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,02	93,12	93,32	93,52	93,72
			Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	39,30	41,63	44,75	48,25	51,36
	2.4	Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup		Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.4.1		Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,41	74,64	74,87	74,96	75,05



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
	2.4.2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase RDTR	%	4,35	13,04	26,09	39,13	52,17	65,22
<b>Misi 3:</b>										
<b>Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing</b>										
3.1	<b>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia</b>		<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	-	65,69	67,11	67,64	68,15	68,66	69,17
	3.1.1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,53	12,66	12,79	12,92	13,04
	3.1.2	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	7,91	8,07	8,23	8,39	8,54
	3.1.3	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,42	73,02	73,18	73,35	73,51
	3.1.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7,428	7.601	7.722	7.842	7.963
<b>Misi 4:</b>										
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas</b>										
4.1	<b>Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>PREDIKAT</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB	BB	BB	BB	A



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
						2022	2023	2024	2025	2026
	4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,5	80,73	80,8	80,9	81
	4.1.3	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4.1.4	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	4.1.5	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	4.1.6	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
	4.1.7	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	48,25	48,50	49,00	49,50	50
4.2	<b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah</b>		<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>-</b>	<b>72,22</b>	<b>74,22</b>	<b>76,49</b>	<b>78,66</b>	<b>80,92</b>	<b>83,83</b>
	4.2.1	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	67	70	73	76	79
	4.2.2	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	60	63	65	67	69
	4.2.3	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	79,66	81,00	82,58	84,2	87,03



Untuk Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.2. berikut :

**Tabel 7.2.**

**Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

URAIAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TERAKHIR 2020	TARGET 2021-2026					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
TUJUAN	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,98	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
SASARAN	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	69,56	69,56	78	79	80	81	82
		2. Jumlah Produksi Pertanian:								
		Padi Sawah	ton	23.346	25.346	26.119,00	26.641,38	27.174,21	27.717,69	28.272,05
		Padi Ladang	ton	26.506	29.506	30.661,00	31.274,22	31.899,70	32.537,70	33.188,45
		Jagung	ton	1.024	263,81	1.126,00	1.148,52	1.171,49	1.194,92	1.218,82
		Ubi Kayu	ton	17.937,31	8.678,18	18.625,00	18.997,50	19.377,45	19.765,00	20.160,30
		Cabe	ton	224,9	230,52	236,29,00	241,01	245,83	250,75	255,76
		Bawang Merah	ton	3,6	3,65	3,71	3,78	3,86	3,94	4,01
		Jahe	Ton	175,4	179,79	184,28	187,97	191,72	195,56	199,47
		Sapi	Kilo	161.776	121.863,00	123.081,63	124.312,45	125.555,57	126.811,13	128.079,24
		Kambing	Kilo	3.993	3.951,00	3.970,76	3.990,61	4.010,56	4.030,61	4.050,77
		Babi	Kilo	132.064	77.027,00	77.412,14	77.799,20	78.188,19	78.579,13	78.972,03
		Ayam Buras	Kilo	83.206	54.263,00	54.425,79	54.589,09	54.752,83	54.917,09	55.081,84
		Ayam Ras Pedaging	Kilo	1.222.092	1.574.928,00	1.582.802,64	1.590.716,65	1.598.670,24	1.606.663,59	1.614.696,91
		Ayam Ras Petelur	Kilo	326,00	-	326,00	326,65	327,31	327,96	328,62
		Itik	Kilo	978	533,00	534,07	535,13	536,20	537,28	538,35



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Dinas Pertanian dan Pangan

KAPUAS HULU  
HEBAT!

		Itik Manila	kilo	2.573	1.444,00	1.446,89	1.449,78	1.452,68	1.455,59	1.458,50
		Telur Ayam Buras	kilo	10.294	10.294,00	10.345,47	10.397,20	10.449,18	10.501,43	10.553,94
		Telur Ayam Ras Petelur	kilo	13.326	13.326,00	13.392,63	14.062,26	14.132,57	14.203,24	14.274,25
		Kelapa Sawit	ton	289.334	1.094.205,47	1.117.062,78	1.139.920,57	1.162.778,35	1.185.636,14	1.208.493,92
		Karet	ton	12.746	19,200	19.776	20.369,28	20.980,36	21.609,77	22.258,06
		Kopi	ton	1,6	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41
		Lada	ton	12,75	12,10	12,46	12,84	13,22	13,62	14,03
TUJUAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	A
SASARAN	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Nilai	19,23	25,77	26	26,50	27	27,50	28
		Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.